

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BOS TERHADAP
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MIN 3 BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Putri Aklima
NIM. 160802029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Aklima
NIM : 160802029
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 November 1997
Alamat : JL.Krueng Daroy II No.55 Desa Lambheu
Kecamatan Darul Imarah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
3. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 21 Juli 2020
Yang Menyatakan



PUTRI AKLIMA
NIM. 160802029

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BOS TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MIN 3 BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

PUTRI AKLIMA
NIM.160802029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 1974032719990310005


Cut Zamharira, S.IP.,M.AP
NIDN. 2017117904

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BOS TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MIN 3 BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2020 M

02 Dzulhijah 1441 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



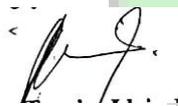
Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 1974032719990310005

Sekretaris,



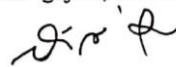
Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904

Penguji I,



Dra. Tasnim Idris, M.Ag
NIP. 195912181991032002

Penguji II,



Dian Rubianty, M.PA
NIDN. 2017127403

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Erita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197305222000032002

ABSTRAK

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang lahir dari kebijakan di bidang pendidikan. Tujuan utamanya ialah untuk meringankan beban biaya bagi masyarakat miskin yang ingin melanjutkan pendidikan sekolah. Dana BOS diberikan kepada seluruh sekolah/madrasah di seluruh Indonesia. MIN 3 Banda Aceh adalah salah satu madrasah yang mendapatkan BOS yang dapat membantu mengembangkan mutu pendidikan di madrasah, seperti adanya penyediaan pendanaan biaya non personalia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan program Dana BOS dengan upaya dapat meningkatkan mutu pendidikan di MIN 3 Banda Aceh sesuai dengan juknis yang berlaku serta apakah terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan Dana BOS. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan program Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan sudah tercapai sesuai dengan target dari perencanaan sekolah, yaitu dalam bidang kemajuan prestasi siswa. Pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh sesuai dengan juknis Dana BOS dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite sekolah sebagai mediator antara wali murid dan pihak sekolah. Dalam pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh terdapat satu hambatan kecil yaitu ketidaksesuaian anggaran yang diberikan satu tahap pada awal Januari sampai Desember untuk 2 semester aktivitas sekolah. Hambatan tersebut menjadi kendala terutama saat adanya penambahan siswa baru, namun penyediaan buku sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di awal tahun ajaran. Dengan demikian, jumlah buku paket yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah siswa.

Kata Kunci : Dana BOS, Efektivitas, Pengelolaan program Dana BOS.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini, yaitu: **“Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh”**.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan beribu terimakasih kepada ibu saya yaitu bu Kamaliah dan ayah saya M.Insya yang telah membesarkan dan mendidik peneliti, serta keluarga tercinta saya lainnya kakak kakak saya kak Yanti, kak Lisa, kak Yana, kak Ayu, Bang Fadli dan dek nadya yang ikut menyemangati dan mendoakan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Semoga jerih payah dan ketulusan kedua orang tua peneliti serta seluruh keluarga mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

3. Eka Januar, M.Soc., Sc., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Muji S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Cut Zamharira, S.IP., M.AP selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta selalu memberikan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan serta staff yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Teman teman seperjuangan yang telah memberi semangat dan membantu peneliti untuk dapat menulis skripsi ini, Putri Marzaniar, Dini, Mbem, husneng, midimid dengan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir dan juga teman teman sohibku Ria, dan terutama Mama yang telah membantu peneliti dalam proses wawancara.

Peneliti telah berusaha dengan baik dalam penulisan proposal skripsi ini, namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sumbangan gagasan, kritikan, saran dan masukan cukup diharapkan peneliti demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2020



PUTRI AKLIMA
NIM.160802029

DAFTAR ISI

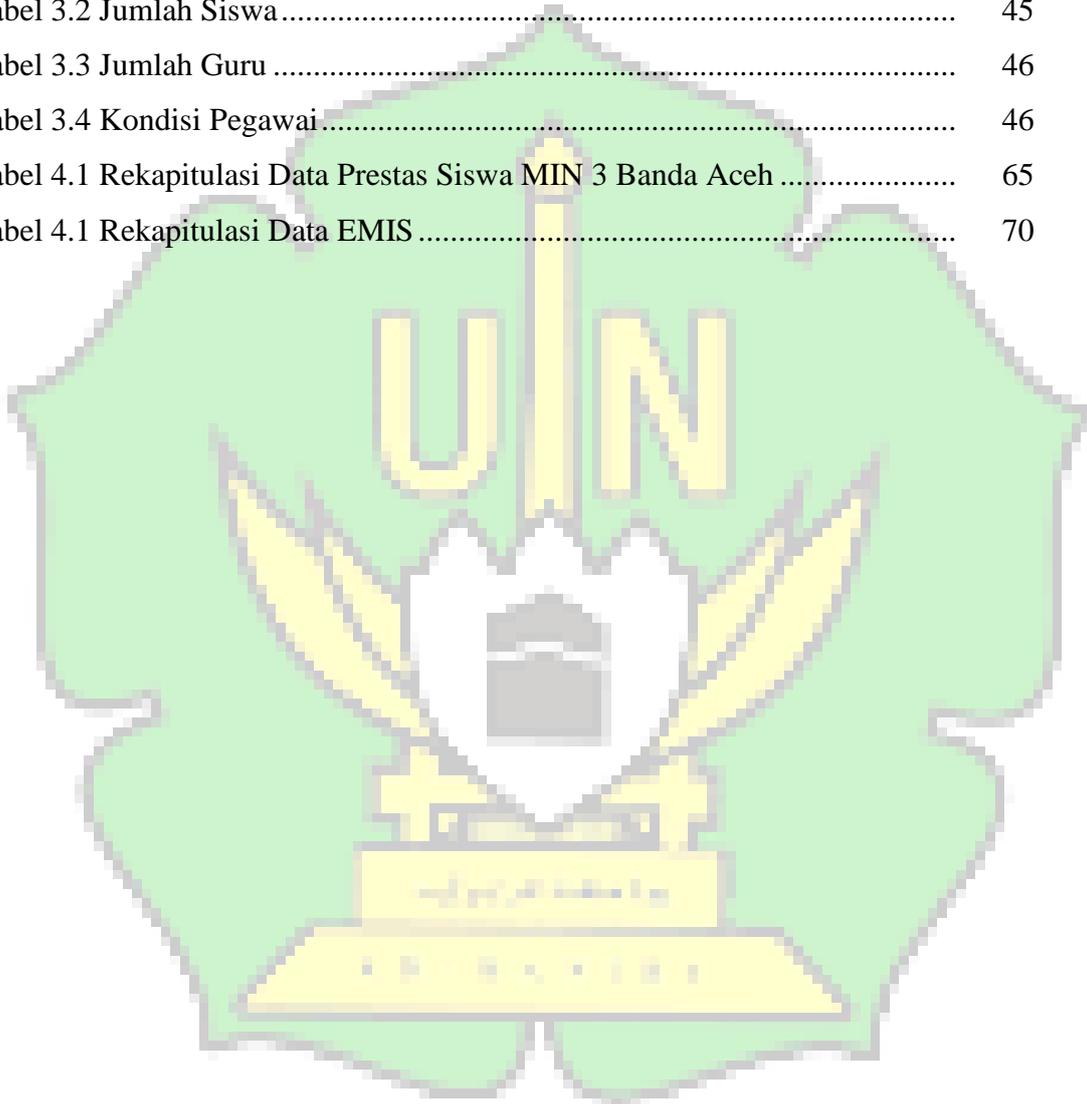
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	5
1.2 Identifikasi Masalah Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penjelasan Istilah	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	8
1.7.2 Lokasi Penelitian	9
1.7.3 Sumber Data	9
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.7.5 Teknik Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Efektivitas.....	18
2.2.1 Pengertian Efektivitas	18

2.2.2 Indikator Efektivitas.....	19
2.3 Kebijakan Publik.....	21
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	21
2.3.2 Siklus Kebijakan Publik.....	23
2.3.2 Jenis-jenis Kebijakan Publik.....	25
2.3.4 Kebijakan Pendidikan.....	26
2.4 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	29
2.4.1 Pengertian Dana BOS.....	29
2.4.2 Mekanisme Pengelolaan Dana BOS.....	30
2.4.3 Tujuan Dana BOS.....	31
2.4.4 Komponen Pembiayaan Dana BOS Madrasah.....	31
2.4.5 Larangan Penggunaan Dana BOS.....	37
2.5 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	40
3.1 Gambaran Umum MIN 3 Banda Aceh.....	40
3.1.1 Sejarah singkat MIN 3 Banda Aceh.....	40
3.1.2 Profil MIN 3 Banda Aceh.....	41
3.1.3 Identitas Kepala Sekolah MIN 3 Banda Aceh.....	42
3.1.4 Visi dan Misi MIN 3 Banda Aceh.....	43
3.1.5 Kondisi Siswa dan Guru.....	44
3.1.6 Struktur Organisasi MIN 3 Banda Aceh dan Pembagian Tugas.....	46
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	50
4.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di MIN 3 Banda Aceh.....	50
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.2 Komponen Pembiayaan Dana BOS Madrasah.....	31
Tabel 3.1 Identitas MIN 3 Banda Aceh.....	42
Tabel 3.2 Jumlah Siswa.....	45
Tabel 3.3 Jumlah Guru.....	46
Tabel 3.4 Kondisi Pegawai.....	46
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Prestas Siswa MIN 3 Banda Aceh.....	65
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data EMIS.....	70



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	39
Bagan 3.1 Struktur Organisasi MIN 3 Banda Aceh	47
Bagan 4.1 Mekanisme Penyaluran Dana BOS	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran III : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kota
Banda Aceh
- Lampiran IV : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian di MIN 3 Banda Aceh
- Lampiran V : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran VI : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu taraf hidup yang semestinya berlangsung di sepanjang proses pertumbuhan anak-anak. Taraf hidup merupakan tingkat kehidupan yang dapat menjadi tuntutan dan menjamin kehidupan seseorang di masa yang akan datang¹. Proses pendidikan juga diarahkan untuk mencapai kemajuan potensi pada anak didik secara manusiawi sehingga kemampuan dan kepribadian dapat menjadi unggul. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara sebagai pemegang wewenang tertinggi mampu menerapkan sistem pendidikan nasional yang dapat memenuhi kehidupan masyarakat semakin lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan warga negaranya.² Kemudian pada undang undang NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan penyelenggaraan pendidikan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan juga peningkatan mutu pendidikan. Pada hakekatnya dalam mewujudkan segala yang telah disebutkan pada undang-undang tersebut, Pemerintah telah berupaya mengeluarkan suatu kebijakan layanan pendidikan gratis bagi setiap peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan

¹Eka Januari, "Pemikiran pendidikan Ki.Hajar Dewantara dan Relevansinya dengan Kurikulum 13". Jurnal Stain Kudus. Vol. 11 No.2, 2017. Hlm. 247.

² Undang undang Dasar 1945

(SMK). Dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas bagi masyarakat yang sejauh ini kurang mendapatkan layanan pendidikan dasar.³

Selain itu, kebijakan tersebut juga membahas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan layanan pendidikan gratis dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah memutuskan untuk memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan bagi semua sekolah baik itu sekolah swasta maupun negeri (SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/SMALB/SMK) dan semua jenis kelompok yang rata, baik itu kelompok daerah yang berdomisili di daerah terpencil, masyarakat miskin, dan lain sebagainya.⁴

Menurut petunjuk teknis (juknis), dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program Dana BOS dapat membantu dan mendorong masyarakat agar bisa mendapatkan pendidikan minimal di jenjang SMA. Selain itu, pemerintah juga ingin mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea ke-4 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Harapan terbesar dengan adanya program Dana BOS dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, serta program

³Sumarni, *Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Madrasah*. (Vol.12,No,1,2014). Hlm.83-84

⁴Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Hlm.2

tersebut dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis pada petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis), pengelolaan Dana BOS juga melibatkan beberapa tim yang saling bekerja sama, antara lain tim pusat, tim provinsi, tim kabupaten/kota, sekolah, lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, maka dengan mudahnya sekolah menjadikannya sebagai tumpuan proses pelaksanaan program Dana BOS, agar nantinya sekolah tidak keluar dari penyimpangan dan ketentuan lainnya, agar pengelolaan Dana BOS dapat dikatakan efektif.⁵

Untuk mengukur efektivitas dalam penyediaan pengelolaan Dana BOS dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana penggunaan Dana BOS, kesesuaian jumlah Dana BOS dengan jumlah siswa dalam madrasah, dan keseimbangan antara sasaran, program dan tujuan (puntong). Dengan demikian, jika ketiga indikator ini dapat dijalankan dengan baik, maka sudah semestinya menjadi salah satunya yang dapat mendukung program Dana BOS

Program Dana BOS tidak diberikan secara tunai kepada peserta didik. Akan tetapi, digunakan untuk operasional sekolah. Salah satunya pengadaan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), dan membayar gaji guru honor dan lain sebagainya. Tentunya penggunaan Dana BOS tidak boleh keluar dari alur juknis yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Untuk penyaluran Dana BOS, dananya diberikan secara langsung dari

⁵Farida soamole, "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswadi Sd Negeri 11 Abeli Kel.Tobimeitakec. Abeli Kota Kendari" Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Kediri, 2017. Hlm.3

lembaga penyalur yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk dikirimkan ke rekening sekolah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan Dana BOS dapat berjalan dengan efektif.

Pada dasarnya untuk dapat menunjang efektivitas, maka program Dana BOS dilakukan secara bertahap. Tahapan penyaluran Dana BOS terdapat perbedaan antara Madrasah swasta dengan Madrasah negeri. Pada Madrasah swasta penyaluran Dana BOS diberikan 2 kali dalam setahun. Sedangkan pada Madrasah Negeri penyaluran Dana BOS hanya 1 tahap dalam setahun. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ialah dilaksanakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang meninjau dan merapikan data dari jumlah siswa pada tiap Madrasah dari berbagai Provinsi yang telah diberikan oleh *Education Management Information System (EMIS)* Kanwil Kementerian Agama yang tercantum didalamnya nama-nama siswa, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan dokumen lainnya yang dianggap penting.⁶

Berdasarkan rekap data EMIS Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun ajaran 2018/2019 menyatakan bahwa MIN 3 Banda Aceh salah satu sekolah yang tidak memiliki sarana perpustakaan. Maka dari itu peneliti ingin melihat bukti kebenaran antara data EMIS dan bukti lapangan. Tidak hanya itu peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh serta melihat apakah terdapat hambatan pada proses pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh.⁷

⁶ Petunjuk Teknis BOS Madrasah. Hlm.11

⁷ Rekap data EMIS DASHBOARD Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun ajaran 2018/2019 .

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di MIN 3 Banda Aceh**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini ialah terdapat permasalahan dari data EMIS tahun ajaran 2018/2019 yang menunjukkan bahwasanya tidak adanya sarana perpustakaan. Akan tetapi, perpustakaan juga menjadi sarana yang penting untuk proses pengadaan buku. Jika tidak ada perpustakaan akan sedikit sulit untuk menampung buku-buku yang berjumlah banyak. Apalagi siswa di MIN 3 Banda Aceh tidak terhitung sedikit. Berbagai pemikiran dari penulis untuk melihat pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh. Pada JUKNIS (Petunjuk Teknis) tahun 2020, bahwasanya adanya kenaikan dari jumlah Dana BOS tahun lalu dengan tahun sekarang. Dana BOS Tahun ajaran 2018/2019 untuk tingkat MI 800.000/siswa sedangkan pada tahun 2020 yaitu berjumlah 900.000/siswa. Maka dari itu penulis ingin melihat efektivitas pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memilih rumusan masalah yang berhubungan dengan pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MIN 3 Banda Aceh?

2. Apakah terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh dalam meningkatkan mutu pendidikan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MIN 3 Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui adanya faktor penghambat atau tidak selama proses penggunaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan tambahan referensi khususnya pada kajian efektivitas pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa yang melakukan kajian tersebut.

2. Praktis

Diharapkan kepala sekolah dapat merencanakan, mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan operasionalisasi Dana BOS serta bagi tenaga pendidik dapat mengembangkan kegiatan pendidikan dari operasional Dana BOS.

3. Pribadi

Diharapkan dapat memberi tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam mempraktikkan teori ilmu administrasi negara khususnya tentang kebijakan publik dan implementasinya yang telah diterima dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas atau dengan kata lain dikenal dengan tingkat keberhasilan yang diperoleh oleh seseorang maupun dalam berorganisasi. Terdapat indikator indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan program, yaitu adanya ketetapan sasaran program, tujuan program, sosialisasi program dan pemantauan program.
2. Tim BOS adalah orang-orang yang berkecimpung untuk mengelola Dana BOS. Terdapat tim BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota maupun Tim BOS Sekolah.
3. Petunjuk Teknis Dana BOS atau sering disebut dengan singkatan Juknis adalah pedoman untuk melihat terkait proses berlangsungnya pengelolaan Dana BOS.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

5. Pengguna Anggaran Kementerian Agama yang disingkat PA adalah menteri agama yang memiliki kewenangan penggunaan anggaran di Kementerian Agama.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk dapat melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di Kementerian Agama.
7. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk pengeluaran belanja negara.
8. Surat Perintah Membayar atau disingkat dengan SPM adalah dokumen yang dikeluarkan dari KPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah atau RKAM adalah penyusunan pelaksanaan kegiatan kegiatan untuk 1 tahun ajaran.
10. Data EMIS atau singkatan dari *Education Management Information System* adalah informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan sekolah menginput data.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Hal yang terpenting dalam penelitian ilmiah adalah adanya metode penelitian, karena metode penelitian digunakan untuk dasar panduan mendapatkan data yang lengkap, akurat dan objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebenaran dalam penelitian dapat dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau

menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif. Dalam penelitian kualitatif diskriptif peneliti dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka dan peneliti dapat memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.⁹ Dengan demikian, peneliti menganalisis data dalam bentuk kata-kata maupun gambar dengan acuan landasan teori.¹⁰

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 3 Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini didasari karena dalam rekapan data EMIS tahun 2019 MIN 3 Banda Aceh tidak memiliki ruang perpustakaan. Sedangkan dalam program Dana BOS, salah satunya adalah adanya biaya untuk pengadaan buku perpustakaan. Oleh karena itu penulis tertarik memilih MIN 3 Banda Aceh sebagai lokasi penelitian dengan melihat pengelolaan Dana BOS dan hambatan pernah terjadi selama proses aktivitas sekolah.

1.7.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan. Penentuan sampel dilakukan secara “purposive sampling” yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa

⁸Anas Romzy Hibrida, Skripsi : *studi efektivitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS)*, (Jember:Universitas Jember,2013). Hlm.40

⁹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Alfabeta,2016), Hlm.61

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 8.

responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun yang menjadi key informan adalah:

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Kepala sekolah	1 orang
Bendahara sekolah	1 orang
Guru	1 orang
Komite sekolah	1 orang
Wali murid	3 orang
Jumlah	7 orang

Sumber :Olahan Peneliti

1. Kepala Sekolah

Berdasarkan Juknis 2020, Kepala sekolah adalah salah satu anggota tim BOS yang memiliki tugas untuk memastikan dan bertanggung jawab penuh terhadap kesesuaian pengelolaan Dana BOS, Maka dari itu kepala sekolah juga menjadi alasan peneliti untuk menjadikannya sebagai informan peneliti.

2. Bendahara sekolah

Bendahara sekolah adalah anggota yang memegang peranan sangat penting, karena fungsinya adalah sebagai operator dapodik (data pokok kependidikan) madrasah. Maka dari itu peneliti memilih bendahara yang merupakan salah satu informan peneliti.

3. Komite sekolah

Komite sekolah adalah individu yang dapat membantu proses pengelolaan Dana BOS di madrasah. Maka dari itu, komite sekolah juga dijadikan sebagai informan peneliti.

4. Guru

Guru adalah salah satu orang yang merasakan akan adanya pemberian biaya Dana BOS. Maka dari itu, guru juga merupakan informan penting untuk menguatkan data penelitian.

5. Wali murid

Peneliti akan memilih salah satu wali murid yang sudah merasakan pelayanan Dana BOS. Wali murid juga memiliki peran yang penting, karena peneliti akan melihat jawaban yang sinkron antara pihak sekolah dengan wali murid.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Efektivitas pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Kota Banda Aceh. Data sekunder didapatkan dengan mencari dan mempelajari buku-buku tentang program Dana BOS (petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis), peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian agar terarah dan sistematis.¹¹

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian yang berkaitan dengan penggunaan Dana BOS. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat,

¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006),. Hlm. 124.

maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.¹² Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi juknis Dana BOS dan profil sekolah.

3. Observasi

Menurut Arikunto, observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti.¹³ Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi partisipatoris terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keberhasilan program Dana BOS. Disamping dilakukan pengamatan, peneliti mencari informasi maupun data yang mendalam tentang efektivitas pengelolaan Dana BOS dan faktor penghambat program BOS di lembaga tersebut.

4. Wawancara

¹² Sugiyono, op. cit. Hlm. 329.

¹³ Sugiyono, op. cit. Hlm. 125.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁴ Wawancara dilakukan kepada aktor-aktor/informan kunci yang terlibat dalam program Dana BOS di madrasah tersebut. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan program Dana BOS. Mengingat lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan sampelnya menggunakan cara purposive (dipilih secara sengaja), dengan memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan peneliti tentang karakteristik dari obyek yang diteliti.

Terdapat beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁵

Dalam hal ini, proses wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar masalah

¹⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010),. Hlm. 118.

¹⁵ Anas Romzy Hibrida,.Op.Cit.Hlm.52.

yang akan ditanyakan. Sehingga informan memiliki keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tanpa merasa dibawah tekanan dan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara bebas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu komponen terpenting yang didalamnya terdapat tahap-tahap untuk menemukan hasil penelitian yang absah. Analisis data yang akan dipilih ialah analisis data *Interactive Model*. Berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis data :¹⁶

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti dapat mengumpulkan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian dan kemudian dilengkapi dengan hasil pencarian selanjutnya.
2. Tahap reduksi data, merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasikan untuk menjadi temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
3. Tahap penyajian data, merupakan data yang diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Penyajian data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif* (Bandung :Alfata,2012),hlm.08

4. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁷



¹⁷ Miles dan Huberman, *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), Hlm. 16-18.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat menemukan adanya suatu perbandingan dengan penelitian yang akan dikaji pada saat ini.¹⁸ Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
Sumarni, 2014.	<i>Efektivitas Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah</i>	Hasil penelitian ini ialah kinerja dari pengelolaan Dana BOS sudah sangat positif. Akan tetapi hanya ada satu hambatan terkait dengan pencairan Dana BOS yang cenderung terlambat untuk periode triwulan pertama. Sehingga menghambat madrasah

		untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. ¹⁹
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni pada tahun 2014. Hanya melihat dari 2 indikator efektivitas saja. Yaitu waktu dan kinerja. Akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan melihat dengan beberapa indikator yang berbeda.</p> <p>Persamaan : Menggunakan penelitian kualitatif dan membahas mutu pendidikan.</p>		
Ayu komang ratna dewi, I Made Yudana, dan Anak Agung Gede Agung,2015.	<p><i>Efektivitas Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng</i></p>	<p>Hasil penelitian ini ialah dilihat dari input, proses dan produk sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Dan hanya terdapat satu kendala dalam pelaksanaan Dana BOS yaitu terkait dengan kemampuan kepala sekolah dalam menyalurkan Dana BOS²⁰</p>
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Ayu komang ratna dewi, I Made Yudana, dan Anak Agung Gede Agung membahas terhadap kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan program Dana BOS. Sedangkan peneliti lebih membahas mengenai bagaimana pengelolaan Dana BOS yang dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan juknis 2020.</p> <p>Persamaan : Menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan beberapa informan yang sama.</p>		

¹⁹Sumarni "Efektivitas dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah".(Vol.12.No.1,2014) Hlm.83-98

²⁰Ayu komang ratna dewi, I Made Yudana, dan Anak Agung Gede Agung, *Efektivitas Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng (Vol.6,No1,2015)Hlm.9*

Mellani, 2016.	<i>Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Penyajian Laporan Pertanggungjawab an Pada SMA Aisyah 1 Palembang.</i>	Penyaluran dana BOS pada SMA Aisyah 1 Palembang kurang efektif karena belum sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PKSBBM, hal ini disebabkan karena pengelolaan Dana BOS yang seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan juga pada alokasi biaya penggunaan Dana BOS terdapat biaya lain-lain yang tidak dijelaskan ²¹
<p>Penelitian yang dilakukan Mellani menambahkan indikator analisis untuk melihat kelengkapan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu melihat keseluruhan efektivitas penggunaan Dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan anak.</p> <p>Persamaan : Menggunakan penelitian kualitatif dan juga melihat peran bendahara sekolah sebagai pemegang Dana BOS.</p>		

Sumber: Olahan Peneliti

2.2 Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan

²¹Mellani, *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pada SMA Aisyah 1 Palembang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.2016.

suatu unit keluaran (*output*) dan dapat diselesaikan tepat waktunya dengan rencana yang telah ditetapkan.²² Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.²³

2.2.1 Indikator Efektivitas

Sugiyono dalam Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:²⁴

1. Ketepatan sasaran program, yaitu bagaimana dapat menentukan peserta program sebagai sasaran program. Menurut Makmur ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.²⁵ Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan

²²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta:Andi,2009).Hlm.134.

²³Syamsir, *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec.Kulo Kab.Sidrap*, S-1 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,UIN Alauddin, 2014,Hlm.25.

²⁴Kartika Febri Yuliana, Skripsi: *EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS (P2KM)* (BandarLampung: Universitas Lampung,2017),Hlm.29-30.

²⁵Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* . (Bandung:Refika Aditama,2011). Hlm.08

program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto, memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.²⁶

3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan dalam Streers menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.²⁷ Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti perodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit. Adapun dalam pencapaian tujuan program terdapat input, proses dan hasil. Ketiga ini yang menentukan keberhasilan dari tujuan program.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi, pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan.²⁸ Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif

²⁶Totok Mardikonto dan Poerwoko Soebiato *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta,2013).Hlm.86

²⁷M.R. Steers, *Efektivitas Organisasi*.(Jakarta : Erlangga,1985). Hlm.53

²⁸Winardi, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011). Hlm.07

untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya.²⁹

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian atau susunan konsep yang dibuat atas dasar usulan kelompok, seseorang, atau pemerintah. Kebijakan juga merupakan suatu arah tindakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Akan tetapi, sebuah kebijakan tidak sama dengan kebajikan. Terdapat beberapa kebijakan dibuat dengan tidak bijaksana (dibuat tanpa kebajikan).³⁰ Misalnya, kebijakan yang dibuat tanpa kebajikan yaitu kebijakan yang tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan dari kebijakan tersebut dapat menghadirkan permasalahan yang baru untuk dituntaskan kembali. Tentu kebijakan publik seharusnya dibuat dengan penuh kebajikan, terutama dengan berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik tidak dapat dibuat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

Beberapa orang Indonesia tidak mengerti pada arti publik, itu hal yang wajar untuk kita terima. Karena kata publik bukan berasal dari Indonesia. Sebagian orang ketika mendengar kata kebijakan publik maka mereka merujuk pada sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti presiden, menteri, gubernur, atau bupati dan peraturan yang juga dapat dibuat oleh pemerintah daerah seperti qanun yang dikeluarkan oleh DPRA. Maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah kebijakan

²⁹Bohari, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta : PT Bumi Aksara,2004). Hlm.05

³⁰Antonio pradjasto, *Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*,(Jakarta :Demos, 2011) Hlm.2.

yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah. Maka dengan demikian, pemerintah membuat suatu kebijakan atas dasar kepentingan warga negaranya terutama bagi mereka yang berada dalam posisi yang lemah. Adapun kebijakan publik menurut para ahli sebagai berikut:³¹

- a. Eystone “*The relationship of government unit to its environment*” (antar hubungan yang berlangsung diantara unit/ satuan pemerintahan dengan lingkungan).
- b. Wilson “*The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*” (tindakan tindakan, tujuan tujuan dan pernyataan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).
- c. Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).
- d. Chief J.O.Udoji seorang pakar dari Nigeria, telah mendefenisikan kebijakan publik sebagai “*an sanctioned problem or group of related prblems ha afec societyat large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

³¹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*(Jakarta : PT Bumi Akasara,2012), Hlm.13-16.

- e. Gerstone “*all public polic ymaking involves government in some way*” (semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara).

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang meresahkan masyarakat. Lahirnya sebuah kebijakan dapat membuat suatu perubahan pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui implementasi kebijakan itu sendiri.

2.3.2 Siklus Kebijakan Publik

Siklus merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan publik. Siklus atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik menurut Willam Dunn adalah sebagai berikut:³²

1. Perumusan masalah atau Agenda Setting

Merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Yang dilakukan pada fase ini yaitu menentukan isu yang akan diangkat ke dalam agenda kebijakan, isu yang akan diangkat merupakan isu yang dinilai kritis jika diabaikan dalam ruang lingkup yang luas.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

³² Uddin B.SoredanSobirin, *KebijakanPublik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017) Hlm.25-26.

pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Implementasi Kebijakan

Pilihan kebijakan yang ada pada formulasi maka akan diadopsi atau dipilih yang dinilai masalah yang paling urgen, setelah itu baru diimplementasikan. Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Implementasi Kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas.

4. Monitoring Kebijakan

Merupakan suatu proses pemantauan terhadap suatu objek atau kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Tujuannya agar tidak terjadi kekeliruan atau penyelewengan dan dapat meningkatkan efisiensi dalam mengatur rencana kerja.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir dalam suatu kebijakan, yakni proses untuk menilai sejauh mana hasil atau kinerja kebijakan sudah tercapai. Setelah suatu kebijakan diterapkan dan diberlakukan dalam kurun waktu tertentu, maka evaluasi dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri.

Berdasarkan teori siklus kebijakan di atas, penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk pada teori implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat proses pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil dari kebijakan tersebut.

2.3.3 Jenis jenis kebijakan publik

1. Kebijakan substantif VS kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang hanya dapat dilakukan dan diputuskan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan substantif mampu melihat bagaimana kondisi Indonesia untuk kedepannya seperti kebijakan yang menghasilkan keuntungan dan kerugian maupun biaya dan manfaatnya bagi masyarakat langsung. Sedangkan kebijakan prosedural yaitu melanjutkan bagaimana kebijakan substantif itu dapat berjalan dengan semestinya.

2. Kebijakan distributif Vs Kebijakan regulatori VS kebijakan re-distributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan ini hanya dapat diberikan untuk sekelompok orang tertentu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berkaitan dengan adanya suatu larangan atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan Material dan Simbolik.

Kebijakan material kebijakan yang memberikan keuntungan yang nyata bagi penerima. Sedangkan kebijakan simbolik adalah kebalikan dari kebijakan

material. Kebijakan ini tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

4. Kebijakan barang umum VS Kebijakan barang privat

Kebijakan barang umum ialah kebijakan yang dapat dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Sedangkan kebijakan barang privat adalah kebijakan yang sebenarnya bersifat umum, akan tetapi hanya dapat dirasakan oleh batasan orang.³³

Berdasarkan dari uraian penjelasan di atas, bahwasanya jenis kebijakan yang peneliti lakukan adalah kebijakan regulatori. Kebijakan regulatori menyangkut dengan adanya suatu larangan dan aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat atau organisasi yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.

2.3.4 Kebijakan Pendidikan

Salah satu kebijakan negara ialah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang diatur khusus mengenai regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Adapun tujuan kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan merupakan upaya mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik,

³³Ibid.,Hlm.21

mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia.³⁴ Menurut Soekidjo Notoadmodjo, tujuan pendidikan adalah rumusan pada tingkah laku yang lazimnya dirumuskan dalam kategori pengetahuan, kecerdasan, sikap, keterampilan yang diharapkan untuk dimiliki oleh sasaran pendidikan setelah menyelesaikan program pendidikan.³⁵ Jika dilihat dari berbagai jenis kebijakan, kebijakan pendidikan termasuk kebijakan substantif dan prosedural, karena kebijakan ini adalah salah satu amanat pemerintah untuk memperbaiki kondisi Indonesia ke depannya dan juga terdapat prosedural terkait siapa penerima dari kebijakan tersebut serta tujuannya.

Atas dasar itu, dikembangkan pula garis besar kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan hal-hal berikut.³⁶

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

³⁴Udin Syaefuddin, dkk., *Perencanaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm.6.

³⁵Soekidjo Notoadmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Rineka cipta, 2003), Hlm.42.

³⁶Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung :PT Remaja Rosda Karya,2013),Hlm.10

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan Visi Pendidikan Indonesia tahun 2025 yang isinya *terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.*³⁷ Visi tersebut dikembangkan dalam tiga pilar pendidikan nasional yang meliputi:³⁸

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan ditujukan untuk dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat prestasi anak. Visi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan di Indonesia agar dapat belajar sepanjang hayatnya.

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.

Dengan adanya kebijakan pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing bertujuan untuk dapat memberikan perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keberagaman sosial. Dalam standar nasional pendidikan

³⁷ Ibid.Hlm.11

³⁸ Ibid.Hlm.12

peningkatan mutu dilihat dari kepribadian tangguh, etika, wawasan, serta berakhlak mulia.

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik mempunyai tujuan untuk pendidikan jangka panjang yaitu dapat melihat bagaimana kondisi pendidikan dalam 5 tahun kedepan bahkan lebih. Hal ini dapat memberikan dan membandingkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan untuk membenahkan pendidikan di Indonesia dengan perencanaan kebijakan jangka panjang. Adapun perencanaan pendidikan dalam jangka panjang, pemerintah dapat membuat beberapa program yang dapat meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.

2.4 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.4.1 Pengertian Dana BOS

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.³⁹ Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, Dengan demikian, program Dana BOS dapat menekankan biaya pendidikan yang terjangkau bermutu.

³⁹Kemendiknas, Petunjuk Teknis Penggunaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015, (Jakarta : Dekdikbud, 2014), 2.

2.4.2 Mekanisme Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai petunjuk teknis Kemenag (Kementrian Agama) 2020 sebagai berikut:⁴⁰

1. Dana BOS dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
2. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler;
4. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
5. Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah.
6. Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah.

⁴⁰Salinan Lampiran Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.Hlm.5

2.4.3 Tujuan Dana BOS

Secara umum program Dana BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program Dana BOS bertujuan untuk : ⁴¹

- a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa kurang mampu di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
- b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
- c. Meringankan beban biaya operasional bagi siswa di madrasah swasta.

Upaya upaya yang dilakukan pada program Dana BOS dapat menjadikan pendidikan bermutu dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

2.4.4 Komponen pembiayaan Dana BOS madrasah

Tabel 2. 2 Komponen Komponen Pembiayaan Dana BOS Madrasah

NO	KOMPONEN DAN ITEM PEMBIAYAAN	PENJELASAN
1	Pengembangan Perpustakaan Item Pembiayaan, meliputi : 1. Penyediaan buku teks utama	a) Madrasah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan. b) Buku teks utama bagi peserta didik untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema. c) Buku teks utama bagi guru untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran atau tema sesuai kelas yang diajarkan. d) Buku teks utama bagi kepala

⁴¹Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019. Hlm.3.

		<p>Madrasah untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran atau tema.</p> <p>e) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>f) Buku teks utama yang diadakan oleh Madrasah melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE) wajib dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Madrasah. Buku teks utama ini digunakan sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Pemerintah.</p>
2.	Penyediaan buku teks pendamping	<p>a) Madrasah dapat menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan.</p> <p>b) Buku teks pendamping diadakan untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran.</p> <p>c) Buku teks pendamping yang boleh diadakan oleh Madrasah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Pemerintah.</p>
3.	Membeli buku nonteks	<p>Buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter, moderasi beragama dan pengembangan literasi madrasah sesuai dengan mekanisme pengadaan. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>
4.	<p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p>	<p>Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun melalui daring.</p> <p>Pemeliharaan atau pembelian baru atau koleksi perpustakaan</p> <p>Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.</p> <p>Pengembangan pangkalan data (database) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library).</p> <p>Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.</p> <p>Pembelian buku teks utama dan buku teks pendamping maksimal 20% (dua puluh persen) dan buku nonteks yang antara lain buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi maksimal 5% (lima persen) dari dana BOS madrasah yang</p>

	<p>diterima. Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala madrasah di madrasah telah terpenuhi. Pembelian buku teks utama, buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik. Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak dapat dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui mekanisme pengadaan madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
2	<p>Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Penggandaan brosur, formulir pendaftaran, kartu tes, naskah soal (cetak/aplikasi) b) Pembuatan spanduk untuk penerimaan peserta didik baru c) Biaya Konsumsi d) Honor panitia e) Transportasi untuk berkoordinasi ke instansi/lembaga lain f) Kegiatan awal masuk Madrasah (Matsama/orientasi pengenalan siswa)
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Item pembiayaan, meliputi: Kegiatan pembelajaran meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran Kontekstual, 2. Pengembangan pendidikan karakter, 3. Pembelajaran remedial, 4. Pembelajaran pengayaan, dan 5. Pemantapan persiapan ujian. Kegiatan <p>Ekstrakurikuler meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekskul Pramuka, Tahfidz, Olahraga, Seni Bela diri, Seni Musik, Seni Tari dan Peran, Seni Media, Kewirausahaan dan Ekskul Lainnya yang sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan Madrasah. 2. Organisasi Siswa Intra 	<ol style="list-style-type: none"> a) Dapat dibayarkan honor dan/transportasinya untuk pelatih ekskul yang didatangkan dari luar madrasah. b) transportasi untuk GBPNS dapat dibayarkan jika kegiatan ekskul diluar lokasi madrasah. c) untuk GBPNS yang juga sebagai pengajar ekskul dapat dibayarkan honorinya jika belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. d) Honor jam mengajar tambahan untuk GBPNS yang telah sertifikasi dapat dibayarkan apabila bukan dalam memenuhi beban minimal jam mengajar 24 jtm. (sesuai dengan KMA 110 Tahun 2007 ttg Perubahan Atas KMA Nomor 426 Tahun 1995 tentang Honorarium Kelebihan jam Mengajar Guru tetap pada Madrasah Negeri di Lingkungan Kementerian Agama) e) Biaya pembinaan lomba. f) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidental/mengikuti lomba biaya transportasi siswa/

	<p>Sekolah (OSIS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) 4. Pendidikan lingkungan hidup. 5. Kegiatan Ilmiah, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik dan penelitian. 6. Pembiayaan lombalomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah dan/atau pemerintah daerah 	<p>guru dapat menggunakan sewa kendaraan.</p> <ol style="list-style-type: none"> g) Biaya sewa fasilitas/sarana ekstrakurikuler. h) Biaya pendaftaran mengikuti lomba. i) Membeli alat-alat perlengkapan untuk kebutuhan ekstra kurikuler.
4	<p>Kegiatan Penilaian dan Ujian/Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Item pembiayaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian harian 2. Penilaian Akhir Semester (PAS)/Penilaian Akhir Tahun (PAT) 3. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP) 4. Ujian Madrasah/UAMBN/USBN Selama tidak dianggarkan dari APBN/APBD. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban. b) Biaya koreksi Ujian madrasah c) Pengawas ruangan untuk UN, USBN, Ujian Madrasah/UAMBN. d) Honor proktor dan teknisi untuk simulasi/tryout dan UNBK/UAMBNBK. e) Biaya transport pengawas ujian di luar madrasah tempat mengajar yang tidak dibiayai APBN/APBD. Penilaian Harian tidak dapat dibentuk kepanitiaan. f) Biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian akhir (PAS dan PAT) dan ujian(UN, UAMBN, USBN,UM, UMBD); g) Besaran honor kepanitiaan, proktor, teknisi, pengawas ujian berpedoman pada peraturan yang berlaku
5	<p>Pengelolaan Madrasah Item pembiayaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai. 2. Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik. 3. Penggandaan, 	<ol style="list-style-type: none"> a) Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, buku raport, administrasi guru dan siswa, Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan flasdisk). b) Air minum mineral galon/kemasan, gula, kopi, teh, jamuan tamu sesuai dengan kebutuhan dan dalam batas kewajaran. c) Konsumsi rapat dan kegiatan

	suratmenyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS, dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.	<p>madrasah terkait dengan KBM.</p> <p>d) Alat-alat kebersihan madrasah</p> <p>e) Penggandaan laporan.</p> <p>f) Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa dibayarkan insentifnya adalah bendahara pengeluaran pembantu (sebanyak 2 kali);</p>
6	Langganan daya dan jasa	<p>a) Listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar</p> <p>b) Biaya tambah daya listrik dan pemasangan baru.</p> <p>c) Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru. Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah yang tidak ada jaringan listrik.</p> <p>d) Penggunaan Internet dengan mobile modem/internet berlangganan dapat dibayarkan maksimal Rp. 700.000,-/bulan.</p> <p>e) Biaya untuk tambah daya listrik sesuai kebutuhan madrasah.</p>
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	<p>a) pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perbaikan fasilitas madrasah lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan.</p> <p>b) Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi madrasah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik.</p> <p>c) Pemeliharaan perabot dan AC perpustakaan, dan ruang belajar</p> <p>d) Penggunaan dana BOS untuk rehab ruang kelas atau pemeliharaan gedung madrasah/ fasilitas madrasah lainnya maksimal 15% per tahun dari jumlah dana yang diterima;</p> <p>e) Apabila terjadi kasus force majeure (bencana alam, kebakaran, banjir, dll) maka dapat dilakukan rehab</p>

		kembali dalam tahun yang sama.
8	<p>Pembayaran Honor Item pembiayaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GBPNS (hanya untuk memenuhi SPM) 2. GBPNS ekstra kurikuler 3. Pegawai administrasi 4. Pegawai perpustakaan 5. Penjaga Madrasah 6. Satpam 7. Pegawai kebersihan 8. Operator data selama tidak dianggarkan dari sumber dana lainnya (APBN/APBD) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Dalam pengangkatan GBPNS/tenaga kependidikan bukan PNS madrasah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi GBPNS harus sesuai dengan bidang yang diperlukan. b) Bagi madrasah negeri yang memiliki GBPNS dan tenaga kependidikan bukan PNS (K2) sebaiknya menganggarkan honorinya pada belanja pegawai c) GBPNS yang sudah mendapatkan sertifikasi dapat dibayarkan honorarium bulanan sesuai dengan KMA 110 Tahun 2007; d) Bagi guru GBPNS impassing KJM nya dibayarkan jika lebih dari 37,5 jtm bagi guru MI, sedangkan untuk guru MTs dan MA 40 jtm e) GBPNS yang mendapatkan KJM dapat diberikan honorarium atas kelebihan jam mengajar sesuai dengan KMA 110 tahun 2007; kegiatan pembelajaran di luar 24 jtm atau bulan yang tidak terbayarkan tunjangan sertifikasinya.
9	<p>Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Item Kegiatan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan KKG/MGMP 2. Kegiatan KKM/MKKM. 3. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah untuk pengembangan KKG/MGMP/KKM/MKKM atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah tersebut dan diluar hari mengajar. b) Biaya pendaftaran, akomodasi dan transport seminar/ pelatihan yang dilakukan oleh instansi/lembaga lain apabila tidak dibiayai oleh instansi/lembaga tersebut sebagai penyelenggara.

		c) Madrasah dapat mengadakan pengembangan profesi guru atau peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, satu kali/tahun selama tidak dibiayai dari sumber dana lainnya (APBN/APBD)
10	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran (Termasuk penunjang UNBK/UAMBN-BK) Item pembiayaan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Desktop/work station 2. Laptop 3. Proyektor 4. Printer 5. Scanner 6. Pengadaan perangkat ICT dalam menunjang UNBK/UAMBN-BK 	<ol style="list-style-type: none"> a) Pembelian Printer 2 unit/tahun b) Desktop/workstation maksimum 10 unit, dan bagi madrasah yang melaksanakan UNBK/UAMBNBK sesuai kebutuhan. c) Laptop 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 7 juta dengan garansi resmi. d) Proyektor maksimal 3 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta/unit dengan garansi resmi. e) Pembelian server berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Spesifikasi minimal untuk Desktop/work station, adalah : prosesor Intel Core i3 atau yang setara, memori standar 4GB DDR3, hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; monitor LED 18,5 inci; sistem operasi Windows 10; aplikasiterpasang word processor, spreadsheet, dan presentation garansi 1 (satu) tahun

Sumber : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS

2.4.5 Larangan Penggunaan dana BOS

1. Disimpan dengan maksud dibungakan
2. Dipinjamakan kepada pihak lain
3. Membeli perangkat lunak (*software*) atau untuk pelaporan keuangan BOP/BOS atau *software* sejenis.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA/Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya.

5. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (Bukan inventaris)
6. Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat.
7. Digunakan untuk rehabilitas sarana dan prasarana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat.
8. Membangun gedung atau ruangan baru.
9. Membeli lembar kerja siswa (LKS).
10. Membeli saham.
11. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besr nasional.
12. Membiayai penyelenggaraan upacara atau keagaamaan.
13. Membiayai kegiatan yang telah diayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam proposal penelitian kualitatif adalah sebuah alur pikir sementara atau proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan penelitian pendahuluan yang dikombinasikan dengan kajian pustaka, konsep dan landasan teoritik yang menggambarkan kejadian secara runtut, hubungan sebab dan akibat, pengaruh dari beberapa faktor utama maupun faktor tambahan yang digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan.⁴² Dengan demikian, sebelum melakukan penelitian dirumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian yang disajikan dalam gambar 2.1 berikut:

⁴² Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: NilaCakra, 2018), Hlm. 141.

Efektivitas Pengelolaan dana BOS Terhadap
Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Madrasah 2020

Indikator Efektivitas :

Ketetapan sasaran

Tujuan program

Tujuan program

Sosialisasi program

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Sumber : Olahan Peneliti

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum MIN 3 Banda Aceh

3.1.1 Sejarah singkat MIN 3 Banda Aceh

Asal usul MIN 3 Kota Banda Aceh berawal dari nama PERISAI yang merupakan singkatan dari Perguruan Islam Sukadamai sebagai salah satu Sekolah Rendah Islam (SRI), pada tahun 1978 berganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sukadamai, dan tahun 2017 berganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Kota Banda Aceh. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Mohd Nur Harun (Cut NU), pada mulanya lahan MIN 3 kota Banda Aceh merupakan tanah waqaf dari masyarakat Kek Mu'id pada Tahun 1948 setelah musyawarah dengan kepala kampung yaitu Keuchik Satimin, Wakim Bugei dan Saiman Locok sebagai saksi. Ustadz Idros yang berasal dari Tanjung Pura merupakan satu-satunya tenaga pendidik PERISAI yang telah tersedia 2 ruang belajar dari swadaya masyarakat Kampung Sukadamai.

Selang setahun kemudian bertambah 2 orang tenaga pendidik (Syarbini Hamzah dan Johan Zamzami) hingga pada tahun 1950 dibuatlah papan nama sekolah PERISAI dan dibuat papan reklame simpang Surabaya sehingga banyak siswa di luar kampung yang mendaftar ke PERISAI. Meskipun ruang belajar berlantai tanah, berdinding pelepah kelapa dan bertiang pohon pinang dan beratap daun rumbia, semangat para siswa belajar cukup tinggi.

Pada tahun 1952 PERISAI mendapatkan bantuan tambahan 1 ruang kelas dari Pemerintah Daerah Aceh Besar dan kepala pendidik mulai diberikan honor

dari Pemda Aceh Besar dan mulai diangkat kepala yaitu Ustadz Daud yang berasal dari Takengon. Pada tahun 1959 PERISAI diproses untuk penegerian dan menjadi MIN Sukadamai. Pada masa itu Bapak Safwan Idris sebagai kepala MIN 3 Kota Banda Aceh.

Sejak didirikan PERISAI sebagai Sekolah Rakyat Islam dan beralih ke MIN Sukadamai sampai menjadi MIN 3 Kota Banda Aceh, masyarakat aktif mendukung semua kegiatan yang dilakukan di Madrasah. Bahkan kenang Cut Nu, kegiatan hari besar agama dan hari besar nasional berlangsung dengan cukup meriah di MIN 3 Kota Banda Aceh.

Sejalan dengan perkembangan MIN 3 Kota Banda Aceh telah banyak melahirkan berbagai lulusan yang kiranya sudah dapat mengabdikan Agama, Nusa dan Bangsa. Hingga saat ini bangunan kantor dan kelas sudah bertingkat meskipun belum cukup memadai namun pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara aman dan nyaman.⁴³

3.1.2 Profil MIN 3 Banda Aceh

Kata profil berasal dari bahasa Italia, *Profilare* yang berarti gambaran garis besar. Sedangkan makna dari kata profil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan dari samping (tentang wajah orang), lukisan (gambar) orang dari samping, sketsa biografis, penampang (tanah, gunung, dan sebagainya), grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Berikut adalah profil MIN 3 Banda Aceh :⁴⁴

⁴³ Buku Profil MIN 3 Banda Aceh, Tahun Ajaran 2018/2019. Hlm.01-02

⁴⁴ Op.cit.Hlm.05

Tabel 3. 1 Identitas MIN 3 Banda Aceh

NO	IDENTITAS SEKOLAH	
1	Nama Madrasah	Min Sukadamai (Min 3) Kota Banda Aceh
2	Status Madrasah	Negeri
3	NSM	111111710003
4	NPSN	60703479
5	NPWP	00.228.405.7.101.000
6	Akreditasi	B
7	Alamat	Jln. Kutilang No.7
8	Desa/Kelurahan	Sukadamai
9	Kecamatan	Lueng Bata Kota Banda Aceh
10	Email	025.04.2.601021.kd@gmail.com
11	Telepon	Kode Wilayah :0651 22789
12	Tahun Berdiri	1945
13	Daerah	Perkotaan
14	Status Sekolah	Negeri
15	Kelompok Sekolah	Inti
16	Kegiatan Belajar Mengajar	Pagi
17	Bangunan Sekolah	Milik Sendiri
18	Luas Bangunan	L :1031 M2
19	Jarak Ke Pusat Kecamatan	0,5 Km
20	Jarak Ke Pusat Kota	1 Km
21	Terletak Pada Lintasan	Kecamatan
22	Organisasi Penyelenggara	Pemerintah
23	No. Rekening sekolah	3701002354301
24	Pemegang Rekening	MIN 3 Banda Aceh
25	Nama Bank	Bank Rakyat Indonesia
26	Cabang	Banda Aceh

Sumber : MIN 3 Banda Aceh 2020

3.1.3 Identitas Kepala Sekolah MIN 3 Banda Aceh

Nama : Zuriati, S.Ag. M.Pd
 NIP : 197801252005012002
 Tempat/Tgl Lahir : Desa Lingkok Busu/25 Januari 1978
 Pendidikan Terakhir : S2 Magister Manajemen Pendidikan Universitas Syiah Kuala
 Jurusan : Magester Manajemen Pendidikan

3.1.4 Visi dan Misi MIN 3 Banda Aceh

Terlaksananya suatu aktivitas yang ada disekolah dikarenakan adanya suatu visi dan misi yang telah ditetapkan pada sebuah instansi. Terbentuknya visi dan misi menjadikan sebuah instansi terlihat lebih kokoh. Adapun visi dan misi MIN 3 Banda Aceh sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya siswa yang Cerdas, Terampil, Kreatif, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul dalam prestasi selaras antara Imtaq dan Imtek.

b. Misi

1. Membentuk Akhlaqul Karimah.
2. Mengupayakan penyetaraan kualitas madrasah.
3. Melahirkan kurikulum K13 (Dokumen I) dan silabus (Dokumen II) sebagai landasan pembelajaran.
4. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga peserta didik berkembang secara optimal.
5. Mewujudkan manajemen pendidikan Madrasah yang transparansi dan akuntabel.
6. Menanamkan tanggung jawab guru/siswa dalam menciptakan lingkungan Madrasah yang aman, damai dan bersih dalam suasana islami.
7. Menumbuhkembangkan lingkungan Madrasah di bidang IPTEK dan IMTAQ.

3.1.1 Kedudukan dan Fungsi Madrasah

Adapun kedudukan dan fungsi madrasah yang sudah diterapkan adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. MIN 3 Banda Aceh adalah sebuah lembaga pendidikan formal dan sangat didambakan oleh masyarakat Sukadamai yang pada dasarnya mempunyai mutu prestasi yang tinggi.
2. Bekerja sama dengan Madrasah lain untuk memanfaatkan fasilitas pembinaan yang tersedia untuk peningkatan mutu Madrasah dan lingkungan.
3. Menumbuhkembangkan sikap mandiri Madrasah dan masyarakat dilingkungannya sehingga memiliki perhatian terhadap pendidikan sarana dan prasarana yang selaras dengan Madrasah dan lingkungan.

3.1.5 Kondisi Siswa dan Guru

1. Kondisi Siswa

Siswa merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam sebuah sekolah. Kehadiran siswa dengan tujuan untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan kemampuan serta bakatnya di sekolah.⁴⁶

Tabel 3. 2 Jumlah Siswa

KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
I	40	34	74
II	28	44	72
III	37	45	82
IV	37	41	78
V	30	43	73
VI	43	34	77
Jumlah	215	241	456

⁴⁵Buku Profil MIN 3 Banda Aceh Tahun ajaran 2017/2019.Hlm.03

⁴⁶ Syamsir, Skripsi: *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA*. (Makassar:Universitas UIN Alauddin Makassar,2014),Hlm.53

Sumber :MIN 3 Banda Aceh

2. Kondisi Guru dan Pegawai Sekolah

Selain adanya siswa, guru juga merupakan komponen yang sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar di sebuah sekolah. Guru adalah pekerjaan yang profesinya sangat mulia. Guru adalah sebagai bagian dari organisasi yang memiliki kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Guru mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik untuk siswanya dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat meningkatkan minat belajar siswa dan juga prestasi siswa.⁴⁷ Untuk kelancaran proses belajar mengajar tentunya juga didukung oleh guru-guru yang dapat memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada siswa siswanya. Selain adanya guru, pegawai lainnya yang terdaftar menjadi anggota sekolah juga merupakan komponen yang melengkapi sebuah sekolah. Seperti pegawai perpustakaan, pegawai keamanan sekolah dan lain sebagainya. Sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi utuh. Berikut adalah kondisi guru dan pegawai di MIN 3 Banda Aceh:

Tabel 3. 3 Jumlah Guru

GURU	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Guru tetap	4	14	18
Guru tidak tetap	2	3	5
Jumlah	6	17	23

Sumber :MIN 3 Banda Aceh

Tabel 3. 4 Kondisi Pegawai

GURU	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pegawai Tetap	1	4	5
Pegawai Tidak Tetap	0	3	3
Jumlah	1	7	8

⁴⁷Darmadi, *Guru Jembatan Revolusi* (Surakarta :Percetakan CV Oase Group, 2018).Hlm.40

Sumber :MIN 3 Banda Aceh

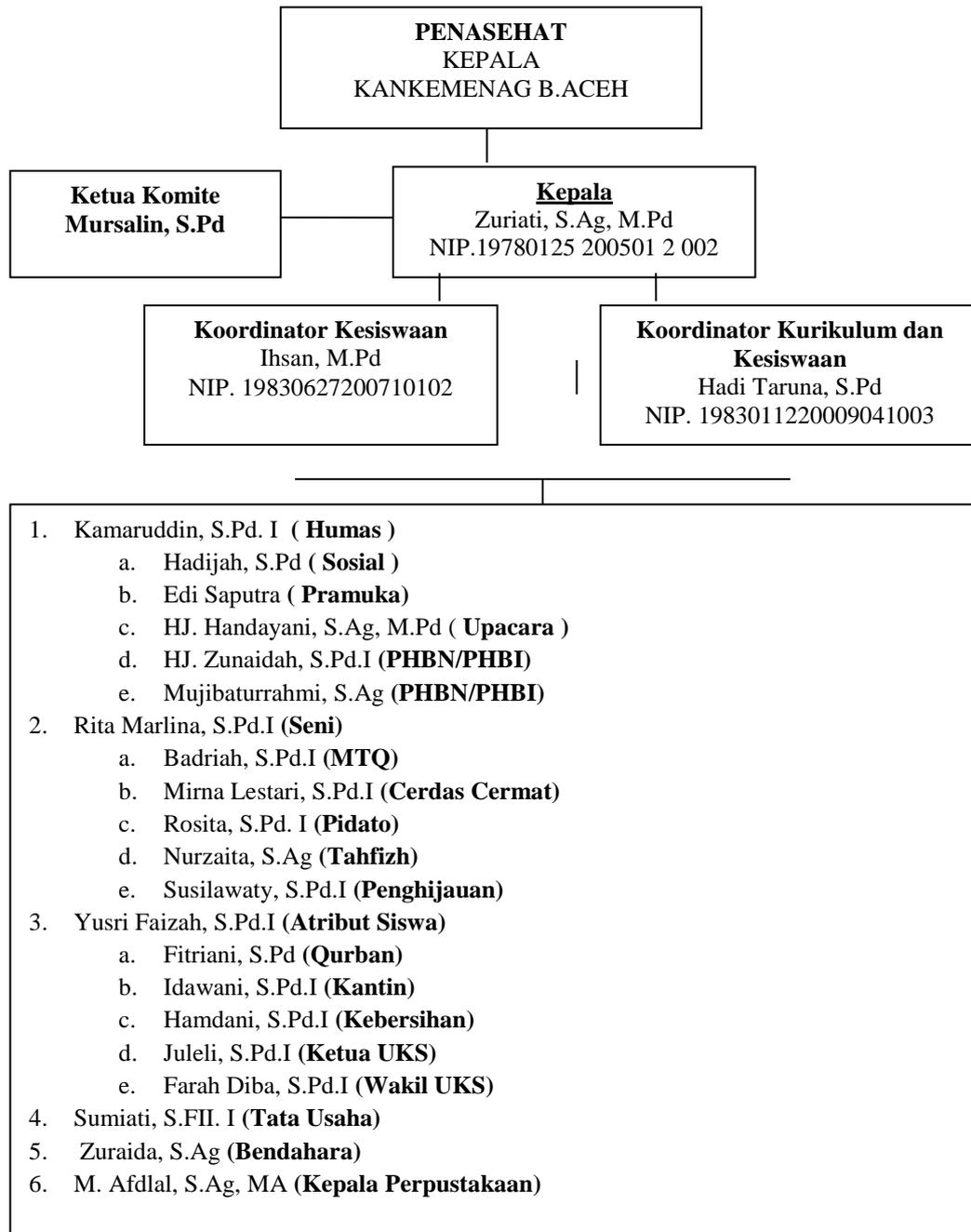
3.1.6 Struktur Organisasi MIN 3 Banda Aceh dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam sebuah instansi menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi. Organisasi sekolah yang baik adalah organisasi yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas tugas dan tanggung jawab setiap individu agar berjalan dengan sempurna, dengan begitu sekolah dapat mencapai tujuan.⁴⁸ Struktur organisasi dapat memberikan suatu gambaran terkait dengan wewenang dan tanggung jawab setiap individu pada sebuah instansi. Oleh karena itu, struktur organisasi disusun sedemikian rupa agar adanya pemisahan fungsi, wewenang serta tanggung jawab setiap bagian dapat terlaksana secara efektif.

Adapun susunan struktur sekolah MIN 3 Banda Aceh sebagai berikut:

⁴⁸Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah*, (Jakarta :Kencana,2017),Hlm.122.



Sumber : Arsip MIN 3 BANDA ACEH 2020

b. Pembagian tugas

1. Kepala sekolah

Tugas dan kewajiban kepala sekolah sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah berfungsi sebagai pendidik, Manager, Pengelola, Administrator, Pengayom, dan Pembimbing.
- b. Kepala sekolah mempunyai tugas menyusun rencana dan program sekolah, membina dan melaksanakan kerja sama/hubungan masyarakat.

2. Komite sekolah

Tugas dan Kewajiban komite sekolah ialah sebagai mitra kerja kepala sekolah untuk mewedahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi mengenai kebijakan program pendidikan RAPBS, dukungan finansial dan lain lain terkait dengan pendidikan.

3. Tata Usaha

Tugas dan kewajiban tata usaha adalah melakukan urusan Persuratan Keuangan, Kepegawaian, dan Kerumahtanggan Sekolah.

4. Perpustakaan

Tugas dan kewajiban bidang perpustakaan antara lain:

- a. Melakukan perencanaan
- b. Pengadaan buku
- c. Investarisasi buku

- d. Membuat katalog
 - e. Menyusun bahan mengatur peminjaman buku dan pemeliharaan buku.
5. Bendahara

Tugas dan kewajiban bendahara antara lain adalah:

- a. Mengelola keuangan sekolah
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
6. Guru Mengajar

Tugas dan Kewajiban guru yang mengajar adalah sebagai berikut:

- a. Guru bertugas mengelola pembelajaran
- b. Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan mempunyai tugas
- c. Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi menyusun program tahunan/ semester, menyusun program satuan pelajaran, menyusun program mingguan/ bulanan dan menyusun program Ulangan Harian.

3.1.2 Aktivitas Sekolah

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Banda Aceh adalah salah satu sekolah jenjang pendidikan dasar yang menerapkan sekolah *fullday* yang berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017⁴⁹. Aktivitas sekolah yaitu hanya 5(lima) hari dalam seminggu dan 8 (delapan) jam dalam sehari. MIN 3 Banda Aceh juga melakukan aktivitas ekstrakurikuler sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat minat, kemampuan, dan kemandirian dari peserta didik.

⁴⁹Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (*Bantuan Operasional Sekolah*) di MIN 3 Banda Aceh

Sebuah organisasi dapat dikatakan organisasi yang sudah efektif apabila dalam pengelolaan sudah dilakukan secara sistematis yaitu mulai dari adanya perencanaan sampai dengan adanya evaluasi suatu kegiatan. Dalam pengelolaan Dana BOS harus adanya perencanaan dan adanya pengawasan, agar nantinya program Dana BOS di sekolah dapat membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah/madrasah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di MIN 3 Banda Aceh ialah melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh pengelola sekolah MIN 3 Banda Aceh yaitu merujuk pada kesepakatan bersama anggota sekolah yang melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Efektivitas Dana BOS dilakukan oleh segenap guru yang memiliki kewenangan dan telah diberikan kepercayaan untuk menjadikan sekolah lebih bermutu.⁵⁰ Tentunya disini guru hanyalah sebagai pelaksana program. Guru sebagai figur yang membantu melancarkan pelaksanaan proses belajar mengajar melalui anggaran yang diberikan dari Dana BOS.

⁵⁰Depniliza Depiani, *Efektivitas Pemanfaatn Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jurnal Manager Pendidikan. Vol.09 No.02,2015,hlm.13

Kepala sekolah MIN 3 Banda Aceh sebagai pengawas pengelolaan program Dana BOS untuk melaksanakan aktivitas sekolah dapat merujuk kepada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada raudlatul athfal dan bantuan operasional pada madrasah tahun anggaran 2020. Sejalan dengan keputusan tersebut dengan begitu tingkat efektivitas juga bisa dilihat melalui Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

Anggaran dana BOS MIN 3 Banda Aceh pada tahun 2020 yaitu Rp.900.000/siswa. Sedangkan jumlah siswa berdasarkan data yang diterima oleh peneliti ialah sebanyak 460 siswa. Anggaran yang digunakan ialah untuk memenuhi kebutuhan yang tertulis pada pedoman penggunaan Dana BOS yang telah dialokasikan pada 10 sub bidang. Data tersebut dapat dilihat pada bab 2 kajian teori pada tabel komponen-komponen pembiayaan Dana BOS madrasah. Pada data tersebut menjelaskan dana-dana yang dialokasikan untuk pembelian buku sebagai perlengkapan siswa untuk belajar. Hal itu berarti sangat memungkinkan perlengkapan buku di sekolah tercukupi melalui anggaran Dana BOS.

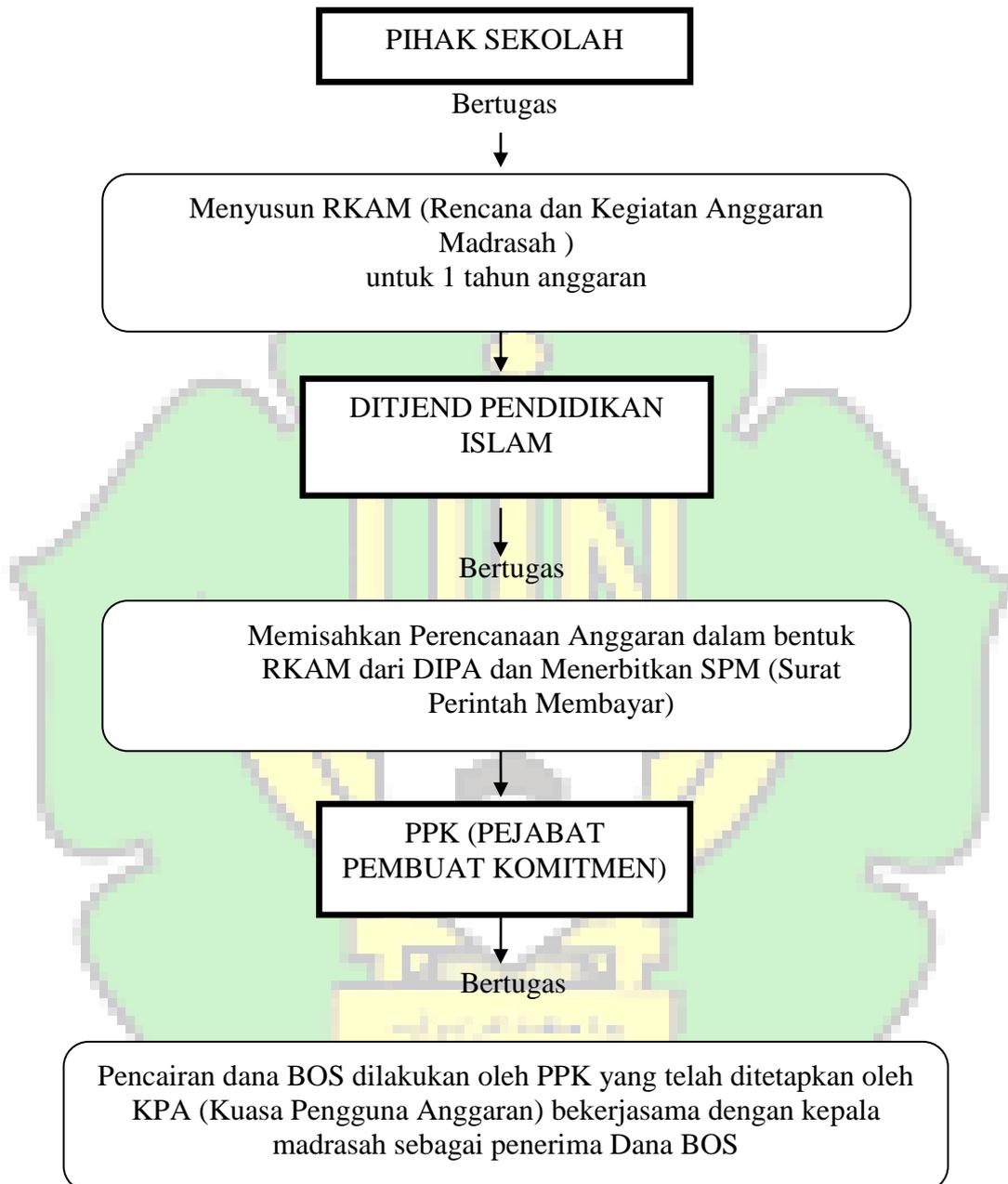
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat (orang tua siswa) kepada anaknya untuk dapat memberikan pendidikan dasar. Undang-undang tersebut dengan tegas menjelaskan bahwasanya setiap anak yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun wajib mendapatkan pendidikan. Undang-undang tersebut dapat dijadikan tonggak utama bagi madrasah untuk menjadikan sekolah berkualitas. Hal tersebut

juga tertuang oleh salah satu misi MIN 3 Banda Aceh yaitu “Mengupayakan Penyetaraan Kualitas Madrasah”

Menurut analisa peneliti bahwasanya letak efektivitas Dana BOS bukan hanya terletak bagaimana tim BOS madrasah dapat mengatur keuangan pembiayaan penggunaan Dana BOS, tetapi makna Dana BOS itu juga terkait bagaimana pihak sekolah dapat memajukan kualitas pendidikan siswa siswa di MIN 3 Banda Aceh.

4.2.1 Mekanisme Pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dialokasikan oleh pusat berdasarkan jumlah siswa yang ada pada tiap tiap sekolah/madrasah. Dana BOS yang disalurkan saat ini sudah disampaikan melalui anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenag (Kementrian Agama) Kabupaten/kota. Pengalokasian Dana BOS hanya dilakukan dalam 1 tahun ajaran, yaitu terhitung dari Januari-desember. Berikut Mekanisme Penyaluran Dana BOS 2020:



Sumber: Juknis Dana BOS 2020

Jika dilihat dari pengelolaan Dana BOS antara madrasah negeri dengan madrasah swasta juga terdapat perbedaan pengelolaan Dana BOS antara Madrasah swasta dengan madrasah negeri. Perbedaan itu terlihat dari segi penyaluran Dana BOS. Madrasah swasta menerima dana BOS adalah sebanyak 2 tahap dalam setahun. Yaitu penyaluran pertama di semester 1 sedangkan penyaluran kedua di semester 2. Akan tetapi, berbeda dengan penyaluran Dana BOS di madrasah negeri, madrasah negeri hanya diberikan 1 tahap penyaluran Dana BOS. Penyaluran tersebut diberikan setiap awal tahun. Maka dari itu pihak sekolah sangat memperhatikan penyusunan RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) agar nantinya tidak ada kekeliruan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun.⁵¹

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekolah bahwasanya pencairan Dana BOS saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena bendahara sekolah/madrasah sudah menjadi BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Oleh karena itu ketika pihak sekolah telah selesai menyusun RKAM, maka untuk pencairan Dana BOS, bendahara sekolah yang kedudukannya sebagai BPP mengajukan Surat Pembiayaan (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian bendahara sekolah menerangkan kembali bahwasanya pada intinya tujuan adanya Dana BOS adalah untuk pembiayaan sarana dan prasarana sekolah, seperti pembelian perlengkapan buku-buku paket setiap pelajaran, pembiayaan untuk perlengkapan alat yang dapat mendukung proses belajar mengajar, seperti alat media pembelajaran, pembiayaan langganan listrik, kegiatan

⁵¹Zuriati, Kepala Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 18 Juni 2020.

ekstrakurikuler dan pembiayaan untuk gaji honorer. Kemudian selain itu, tujuan utama dari program Dana BOS ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dengan begitu Dana BOS hadir juga untuk memberikan keringanan beban masyarakat untuk dibebaskan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa miskin. Namun terkadang masih ada beberapa buku yang kurang, sehingga mungkin ada beberapa siswa tidak mendapatkan salah satu buku paketnya. Hal ini terjadi karena Tapel (Tahun Pelajaran) berbeda dengan tahun pemberian Dana BOS. Jadi, ketika ada siswa bertambah (siswa pindahan) di semester 2 mereka tidak mendapatkan salah satu buku paketnya.⁵²

4.2.2 Komponen-komponen Pembiayaan Dana BOS

1. Pengembangan perpustakaan, yaitu dengan adanya penyediaan buku-buku paket yang akan diserahkan kepada seluruh siswa yang ada di madrasah.
2. Pengembangan bakat dan minat siswa melalui ekstrakurikuler dan berbagai macam perlombaan lainnya.
3. Pembiayaan kegiatan siswa, yaitu pembiayaan HUT Kemerdekaan Indonesia, PMR dan kegiatan lomba.
4. Kegiatan penerimaan siswa baru, seperti penyediaan formulir pendaftaran siswa baru dan berbagai macam biaya ATK/Foto Copy.
5. Pembiayaan proses belajar mengajar, yaitu dengan adanya perlengkapan alat tulis seperti spidol, penghapus papan tulis dan lain yang berkaitan.
6. Pembiayaan langganan Daya dan Jasa (Iuran Listrik dan Air)

⁵²Zuraida, Bendahara Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 23 Juni 2020.

7. Pemberian honorium bulanan untuk guru honor dan tenaga kependidikan honorer.

Berdasarkan penjelasan komponen-komponen yang tertulis diatas adalah data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan pengelola Dana BOS di madrasah yaitu bendahara sekolah. Data diatas juga diperoleh dari bukti buku administrasi Dana BOS dan buku profil madrasah yang menerangkan keikutsertaan siswa dalam kegiatan kegiatan perlombaan dan sebagainya.

Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak pengelola sekolah yaitu mengenai efektivitas pengelolaan Dana BOS adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasarannya.⁵³ Dalam penelitian ini ketetapan sasaran program ialah penentuan kepada siapa saja program Dana BOS ditujukan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Juknis Dana BOS, telah tertera kegiatan apa saja yang telah ditetapkan dalam penggunaan Dana BOS untuk membuat program di sekolah. Menurut Subagyo efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan.⁵⁴ Dalam menganalisis untuk mengukur ketetapan sasaran Dana BOS terdapat 3

⁵³Ahmad Jibril, *Efektivitas Program Perpuseru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan*.Hlm.05

⁵⁴Ibid.

sasaran yaitu sasaran bagi sekolah, bagi guru dan bagi siswa/walimurid. Berikut penjelasan 3 sasaran dalam ketetapan program dana BOS:

a. Bagi Sekolah

Dalam program Dana BOS sekolah adalah lokasi utama pemerintah untuk dapat menyalurkan dana BOS. Syaratnya adalah untuk sekolah yang berada di perkotaan memiliki jumlah siswa melebihi 60 siswa dikecualikan untuk sekolah SDLB/SMPLB/SMALB. Kemudian sekolah juga memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama serta data sekolah sudah terdaftar di data EMIS.

Dengan diberikannya dana BOS ke sekolah maka sekolah dapat terbantu dengan adanya pembebasan biaya melalui anggaran dana BOS dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, seperti kegiatan HUT kemerdekaan, PMR, kegiatan perlombaan dan olahraga. Selain itu, adanya perlengkapan buku bacaan di sekolah, seperti buku paket, buku cerita dan lain sebagainya. Dengan begitu sekolah tidak harus melaksanakan pemungutan biaya kepada guru maupun wali murid.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari kepala sekolah:

“Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat terbantu untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga terbantu meringankan pembiayaan jasa listrik dan air. Sekolah juga akan memberikan buku paket untuk setiap siswa. Akan tetapi, mungkin ada sedikit kendala terkadang jumlah buku tidak cukup. Karena pemberian dana BOS diberikan satu kali di awal tahun, jadi jika ada siswa baru di semester 2. Maka ada kekurangan buku”⁵⁵

⁵⁵ Zuriati, Kepala Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 18 Juni 2020

b. Bagi guru

Pelaksanaan proses belajar mengajar yang merupakan salah satu poin untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini juga menjadi komponen yang penting dalam sekolah. Profesi guru disekolah adalah orang yang sering bertatap muka dan berkomunikasi langsung dengan siswanya. Dengan begitu guru harus memiliki cara agar dalam pelaksanaan mengajar tidak membuat kesulitan baginya. Tidak hanya berbicara dengan tangan kosong, guru juga memerlukan media belajar agar anak mudah paham atas penjelasannya.

Dengan adanya anggaran Dana BOS tersebut dapat memberikan kemudahan bagi guru untuk pembelian bantuan media pembelajaran. Seperti proyektor dan hal lain yang diperlukan sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian tidak hanya itu penyediaan buku paket juga membantu melancarkan proses belajar. Jadi, guru tidak kesulitan untuk mencatat penjelasannya di papan tulis, karena siswa juga bisa menyimak dengan bukunya sendiri. Hal ini sangat membantu bagi guru. Selain itu, bagi guru atau tenaga pendidikan yang berstatus honor juga mendapatkan gaji honor dari anggaran Dana BOS.

Hal ini didukung oleh penjelasan dari salah satu guru di MIN 3 Banda Aceh:

“Benar, biasanya nanti setiap rapat. Kami akan mengusulkan buku apa yang belum ada bagi masing-masing mata pelajaran yang dipegang oleh setiap guru. Hal ini mempermudah guru untuk tidak mengeluarkan biaya buku paket lagi”⁵⁶

⁵⁶Rosita, Guru MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 23 Juni 2020.

Dan juga pernyataan dari Bendahara sekolah MIN 3 Banda Aceh:

“Tidak hanya untuk membeli barang-barang media pembelajaran, tetapi Dana BOS juga diberikan untuk guru dan tenaga kerja yang berstatus honor, karena tidak semua guru disini yang pegawai”⁵⁷.

c. Bagi siswa

Dampak positif adanya anggaran Dana BOS bagi siswa yaitu juga sama menguntungkan dengan guru. Siswa terbantu dengan adanya buku paket yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Sehingga wali murid tidak terbebani dengan buku paket. Selain itu, siswa yang berstatus miskin juga diberikan bantuan beasiswa. Dengan demikian siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga bisa melanjutkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan Dana BOS yaitu untuk mengurangi angka putus sekolah anak.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala sekolah MIN 3 Banda Aceh:

“Seperti yang diketahui tujuan Dana BOS untuk mengurangi angka putus sekolah anak, dengan begitu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga terbantu dengan pemberian beasiswa. Dan untuk setiap siswa lainnya juga terbantu dengan tersedianya buku paket setiap mata pelajaran.”

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti juga melakukan wawancara lanjutan untuk memperkuat pernyataan di atas dengan melakukan wawancara dengan 3 wali murid yang alamat rumahnya juga berdekatan dengan jarak menuju sekolah.

⁵⁷ Zuraida, MIN 3 Bendahara MIN 3 Banda Aceh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 23 Juni 2020.

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu wali murid yang berkenaan dengan pemberian buku paket sekolah.

“Untuk penyediaan buku paket di MIN 3 Banda Aceh itu sangat cepat diberikan. Anak saya saja disitu ada 2 yang sekolah disitu. Untuk yang baru daftar masuk sekolah disitu buku paketnya langsung diberikan ketika pada hari rapat orang tua murid. Menurut saya, ini sangat membantu apalagi jika kondisi seperti sekarang, karena wabah virus corona yang menetapkan sekolah masih diliburkan. Dengan begitu buku paket ini dapat membantu untuk anak belajar di rumah. Akan tetapi, jika ditanya jika pemberian buku selalu lengkap untuk semua mata pelajaran, maka jawabannya tidak. Karena ada anak saya yang baru tamat, dia dari kelas 1 sampai kelas 6 pernah tidak dapat buku. Sepertinya itu giliran untuk semua siswa ada salah satu buku paketnya tidak ada. Jika hari ini anak saya tidak mendapatkan buku ini besoknya giliran anak lainnya. Terkadang saya juga harus memfotocopi buku paket untuk anak saya. Dan juga diminta untuk uang pemeliharaan buku.”⁵⁸

Kemudian untuk memperkuat kembali pernyataan di atas, maka peneliti juga melakukan wawancara lanjutan lagi dengan wali murid lainnya mengenai pemberian beasiswa, maka pernyataan yang disampaikan adalah:

“ iya benar, saya berasal dari keluarga kurang mampu. Saya seorang IRT dan suami saya tukang becak. Akan tetapi, walaupun begitu anak saya sering mendapatkan juara di sekolah, termasuk juara umum juga pernah. Untuk buku insya allah selalu ada dan juga terbantu dengan adanya beasiswa dari sekolah.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketetapan sasaran program dalam pengelolaan Dana BOS sudah dapat dikatakan tepat sasaran. Akan tetapi, terdapat satu penyebab utama dari buku paket yang diberikan tidak semuanya lengkap adalah karena penyusunan anggaran Dana BOS dilakukan di awal tahun untuk satu tahun anggaran yang dihitung dari Januari

⁵⁸ Suharni, wali murid MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 29 Juni 2020.

⁵⁹ Maizaroh, Wali murid MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 23 Juni 2020.

sampai desember. Jadi, jika ada siswa baru yang masuk di semester 2 tidak mendapatkan salah satu bukunya. Sehingga wali murid harus fotocopy salah satu dari buku paket yang tidak didapatkan.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program adalah titik awal yang menentukan keberhasilan atau pencapaian sebuah program. Dengan begitu sosialisasi program harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana.⁶⁰ Dalam hal sosialisasi sekolah mensosialisasikan peruntukan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada ratusan wali murid. sehingga nantinya para orang tua dapat mengerti apa saja yang dibiayai dari dana BOS untuk sekolah. Kemudian sosialisasi selanjutnya ialah berkenaan dengan komite sekolah dan wali murid untuk sosialisasi pengusulan program atau kegiatan apa yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Sosialisasi ini berfungsi untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan. MIN 3 Banda Aceh juga membuat pertemuan wali murid untuk berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk madrasah. Sebelum adanya pertemuan dengan kepala sekolah, bendahara sekolah dan pihak dewan guru lainnya. Dengan lebih awalnya komite sekolah telah melakukan pertemuan pertamanya dengan pihak seluruh wali murid. Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memberikan usulan-usulan program yang didapatkan oleh wali murid lainnya.

⁶⁰Rizcah Amelia, Skripsi : *Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Anaka Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar*, (Makassar : Universitas Hasanuddin,2015). Hlm.73.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bendahara Sekolah MIN 3 Banda

Aceh:

“Kalau untuk membuat program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh madrasah. Kami mempunyai komite sekolah yang merupakan perwakilan dari seluruh wali murid di madrasah yang mana tugasnya ialah memberikan usulan-usulan untuk pelaksanaan program. Jika komite sekolah telah setuju dengan pelaksanaan program. Maka dengan begitu kami menganggap bahwa seluruh wali murid juga telah setuju”⁶¹

Kemudian juga didukung dengan pernyataan komite sekolah MIN 3 Banda

Aceh:

“iya benar, tugas komite sekolah adalah sebagai perwakilan dari ratusan wal murid untuk dapat menyampaikan jika ada pengusulan atau keluhan walimurid kepada pihak sekolah”⁶²

Dari hasil wawancara di atas, harus pula untuk bertanya kepada wali murid agar dapat menguatkan pernyataan diatas. Hal ini juga sesuai apa yang disampaikan oleh wali murid MIN 3 Banda Aceh:

“ Iya benar, kami seluruh wali murid pernah dikumpulkan oleh pihak sekolah untuk rapat walimurid dan ada penjelasan Dana BOS. Adapun isi rapatnya adalah tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang anak kami lakukan di sekolah seperti adanya ekstrakurikuler (ekskul), kegiatan ulangan harian, perawatan sekolah, pembelian perangkat komputer, dan lainnya.”⁶³

Dari hasil wawancara diatas mengenai sosialisasi program Dana BOS yang dilakukan MIN 3 Banda Aceh bahwasanya pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada wali murid terhadap item-item dalam penggunaan Dana BOS.

Akan tetapi, menurut peneliti sosialisasi penggunaan Dana BOS di MIN 3 Banda

⁶¹Zuraida, Bendahara Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata,23 Juni 2020.

⁶²Mursalin, Komite sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata,23 Juni 2020.

⁶³Rosmaini, Wali murid MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 29 Juni 2020

Aceh belum terdapat sosialisasi penggunaan anggaran Dana BOS yang dicantumkan di spanduk atau papan yang bisa dilihat oleh walimurid. Ha ini tentu saja sosialisasi yang telah dilakukan oleh MIN 3 Banda Aceh belum cukup efektif.

3. Tujuan program

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu ataupun kelompok orang. Secara keseluruhan tujuan adalah hasil yang ingin diharapkan oleh setiap orang berdasarkan prinsip masing masing. Adapun tujuan dalam sebuah program adalah pedoman untuk dapat mengukur pencapaian efektivitas dan efisiensi.⁶⁴ Dalam menentukan efektifnya suatu tujuan yaitu kita dapat melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya.

Dalam pengelolaan Dana BOS terdapat tujuan dari terbentuknya sebuah program sekolah. Tujuan adanya program Dana BOS dalam pengeluaran anggaran Dana BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Dengan pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan harus terus menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Menurut para ahli pendidikan, dalam mengukur mutu pendidikan di sekolah terdapat 3 indikator yang bisa dilihat yaitu input, proses dan hasil.⁶⁵

⁶⁴Rizcah Amelia, op.cit.Hlm.75

⁶⁵ Sumarni, op.cit.Hlm.90

- 1) Terdapatnya input untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Input pendidikan dapat dinyatakan bermutu, jika sekolah mampu berproses dengan baik.⁶⁶ Adapun cara untuk dapat mengukur input yaitu :
 - a. Tersedianya visi misi sekolah.
 - b. Tersedianya struktur organisasi (mencakup seluruh guru dan tenaga kerja lainnya).
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang baik.

Adapun poin poin di atas dapat kita lihat dalam profil madrasah. Dengan begitu madrasah dapat memiliki etos kerja yang terukur.

- 2) Terdapatnya proses untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Dalam pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh juga mengacu bagaimana suasana belajar yang baik. Sehingga siswa mudah memahami apa yang sedang guru dijelaskan. Kemudian siswa siswa MIN 3 Banda Aceh juga sering mengikuti lomba lomba dan acara HUT Kemerdekaan Indonesia.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari wali murid MIN 3 Banda Aceh

“Siswa siswi MIN 3 Banda Aceh sering mengikuti perlombaan. Seperti perlombaan antar madrasah dan juga mengikuti perayaan 17 Agustus. Untuk penyewaan baju baju adat itu. Kami menyewa hanya di satu tempat yang sudah bekerja sama dengan pihak madrasah. Bukan sepenuhnya bajunya gratis, akan tetapi jika nyewa di tempat itu ada pemotongan harga. Harga penyewaan baju adat ditempat yang sudah bekerja sama dengan pihak madrasah berbeda dengan harga di tempat lain. Hal ini juga memudahkan para wali murid”⁶⁷

⁶⁶ Sumarni, loc.cit

⁶⁷ Sonawati, Wali murid MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 20 Juni 2020

- 3) Terdapatnya hasil untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang sudah didapatkan oleh siswa di MIN 3 Banda Aceh.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Data Prestasi Siswa MIN 3 Banda Aceh

NO	Bidang Kegiatan	Tingkat Prestasi	Tingkat Kegiatan	Tahun
1	Lari Beregu (HUT RI ke-46)	Juara III	SD/MI Se-Kota B.Aceh	1991
2	Lomba Penejelajahan (HUT Pramuka ke-38)	Juara III	SD/MI Se-kota B.Aceh	1999
3	Tradisional Pelajar Aceh (lomba Qasidah Rebana)	Juara I	Pelajar Se-Prov Aceh	2001
4	Gema Maulid Nabi (Lomba Shalawat Badar)	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2003
5	(Gema Maulid Nabi) Lomba Cerdas Cermat	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2003
6	(Pekan Kreativitas Siwa) Lomba Hula-Hop (PA)	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2006
7	(Pekan Kreativitas Siwa) MTQ Putri	Juara II	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2006
8	(Pekan Kreativitas Siwa) Lomba Hula Hop (Putri)	Juara I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2006
9	(Pekan Kreativitas Siwa)	Juara I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2006
10	Lomba Cerdas Cermat Pertandingan Bola Voli	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2006
11	Olahraga Gembira K3M (Cerdas Cermat)	Juara II	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2008
12	Seleksi Personi	Juara III	SD/MI Se-Kota	2010

	Ke-12		Banda Aceh	
13	Cerdas Cermat	Harapan I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2011
14	Cerdas Cermat MTQ	Juara II	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2012
15	HUT PGRI Kota Banda Aceh ke-67	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2012
16	Lomba Busana Muslim	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2012
17	Lomba MTQ	Juara I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2012
18	Peringatan HAB Ke-43	Juara I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2012
19	Busana Muslimah santai (Personi Banda Aceh)	Juara I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2012
20	MTQ (HUT PGRI Ke-67)	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2012
21	Karnaval 1 Muharram	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2013
22	Menggambar	Juara I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2013
23	Tarik tambang guru (Putri)	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2013
24	Menggambar EXPO Madrasah (Personi ke-3)	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2014
25	Tilawah Putri	Juara II	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2014
26	Rebana	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2014
27	Rebana	Juara III	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2014
28	Rebana (Personi)	Juara I II	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2015
29	Pidato (Putra)	Juara I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2015
30	Tenis Meja (Olahraga Gembira) a. Ganda (Putra) b. Tunggal (Putri)	Juara II dan Juara I	SD/MI Se-Kota Banda Aceh	2016
31	Persami	Juara I,	SD/MI Se-Kota	2016

	<ul style="list-style-type: none"> a. Lomba Kompas (Putra) b. Lomba Menafsir (Putri) c. Lomba Membuat Tandu (Putri) 	Juara II, Juara III dan Juara IV	Banda Aceh	
32	KSM Kompetensi Sains Matematika terintegrasi	Juara 1 dan Juara II	MI Se-Kota Banda Aceh	2018

Sumber: MIN 3 Banda Aceh

Berdasarkan rekapitulasi data prestasi siswa dari tahun 1991 sampai dengan 2018 terdapat peningkatan prestasi siswa dari tahun 2006. Adapun program Dana BOS dimulai pada tahun 2005. Maka dari itu, prestasi siswa terus meningkat ketika anggaran Dana BOS mendukung segala kegiatan, seperti adanya perlengkapan rebana untuk mengikuti lomba dan perlengkapan alat olahraga. Hal ini dapat mendukung siswa dari proses latihan hingga mengikuti lomba hingga mengambil kejuaraan.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari kepala sekolah MIN 3 Banda Aceh:

“Dalam meningkatkan mutu pendidikan disini, ialah salah satu kegiatan yang kami laksanakan ialah ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap semester setelah pelaksanaan ujian selesai, selain itu juga keikutsertaan siswa MIN 3 Banda Aceh dalam ajang perlombaan-perlombaan antar sekolah. Dengan adanya kegiatan ini juga dapat melatih kemampuan dan mental keberanian siswa didepan khalayak ramai. Kemudian ekstrakurikuler saat ini yang unggul di MIN3 Banda Aceh adalah bidang olahraga”⁶⁸

⁶⁸Zuriati, Kepala Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 18 Juni 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya dapat kita lihat tujuan yang diharapkan oleh MIN 3 Banda Aceh dapat dikatakan efektif. Karena ada peningkatan dari prestasi siswa MIN 3 Banda Aceh. Adapun Peran Dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di bidang program ekstrakurikuler sedikit demi sedikit meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu adanya peningkatan prestasi siswa dari tahun ke tahun. .

4. Pemantauan program

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan atau pengawasan program Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh terdapat 2 yaitu pengontrolan internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pengawasan internal, ialah pemantauan yang di lakukan dalam lingkup madrasah. Dalam pengelola madrasah yang paling tinggi adalah kepala sekolah. kepala sekolah yang akan mengontrol apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak. Jika terdapat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan ada revisi RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) untuk tahun ajaran berikutnya.
2. Pengawasan eksternal, ialah pengontrolan yang dilakukan dari luar lingkup sekolah. pengontrolan eksternal dilaksanakan oleh tim audit dari Kemenag (Kementrian Agama) kota Banda Aceh dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melihat kesesuaian program terhadap kebutuhan dan

sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari bendahara sekolah MIN 3 Banda Aceh:

“Untuk pengawasan maupun pemantauan program, pihak sekolah awalnya akan membuat pertemuan untuk menyusun RKAM. Setiap guru juga akan dikumpulkan untuk pengadaan buku paket baru, kemudian untuk pembelian alat media pembelajaran apa saja yang diperlukan. Kemudian setiap akhir ajaran, bendahara sekolah juga membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran pembiayaan Dana BOS.”⁶⁹

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah yang mengatakan:

“Iya benar, untuk pemantauan program biasanya nanti juga akan diadakan rapat seluruh tenaga kerja terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di madrasah”⁷⁰

Pengawasan pengelolaan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak tim madrasah MIN 3 Banda Aceh ialah dengan melihat data rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM) yang telah disusun sebelumnya dengan membandingkan laporan hasil penggunaan anggaran madrasah.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pemantauan setelah program yang dilakukan oleh MIN 3 Banda Aceh untuk mengevaluasi hasil kinerja organisasi madrasah selama MIN 3 Banda Aceh mengelola Dana BOS. Berdasarkan pernyataan tersebut pengawasan yang dilakukan oleh MIN 3 Banda Aceh cukup efektif, karena pemantauan setelah program terlaksana di MIN 3 Banda Aceh.

⁶⁹ Zuraida, Bendahara Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 18 Juni 2020

⁷⁰ Zuriati, Kepala Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata, 18 Juni 2020

Setelah peneliti menganalisis tentang efektivitas program Dana BOS Terhadap mutu pendidikan di MIN 3 Banda Aceh berdasarkan 4 indikator yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program dengan cara melakukan penelitian secara observasi dan wawancara dengan pihak sekolah MIN 3 Banda Aceh yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah dan juga melibatkan orang tua dari wali murid MIN 3 Banda Aceh untuk memperkuat data penelitian. Maka, efektivitas pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di MIN 3 Banda Aceh dapat dikatakan sudah cukup efektif. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 3 Banda Aceh, pihak madrasah dianggap telah mencapai target. Karena peneliti telah melihat prestasi prestasi yang didapatkan oleh siswa MIN 3 Banda Aceh cukup banyak. Walaupun bendahara sekolah mengatakan masih ada juga yang berada di atas prestasi MIN 3 Banda Aceh. Namun, pihak madrasah tidak pernah berhenti untuk menaikkan prestasi anak dari tahun ke tahun. program Dana BOS akan lebih dimanfaatkan secara selektif dan produktif untuk dapat melebihi target yang telah tercapai.

4.2.3 Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana BOS

MIN 3 Banda Aceh merupakan salah satu madrasah negeri yang mempunyai pembiayaan dari anggaran Dana BOS. Dalam pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh berjalan dengan baik. Namun madrasah ini terdapat hambatan dari luar dalam pengelolaan Dana BOS yaitu terkait dengan penyaluran Dana BOS di madrasah negeri yang diberikan 1 tahap untuk 1 tahun anggaran. Hambatan ini hanya terlihat saat ada siswa baru yang mendaftar di semester 2, karena pada saat itu siswa semakin bertambah dan buku yang tersedia sudah

sesuai dengan jumlah siswa yang dilaporkan sebelumnya. Berikut adalah hasil wawancara dengan tim pengelola Dana BOS yang sudah ditetapkan dalam juknis madrasah.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bendahara sekolah :

“jika ditanya hambatan kami yaitu karena madrasah negeri berbeda dengan madrasah swasta. Madrasah negeri dalam penyaluran Dana BOS itu hanya ada 1 tahap pencairan Dana BOS untuk satu tahun. dan terkadang kami kesulitan jika nanti ada siswa yang bertambah di semester 2. Karena jumlah buku yang tersedia yaitu sesuai dengan ketetapan data siswa yang kami laporkan pada semester 1. Tapi jika ada siswa yang pindah dan ada siswa yang masuk. Maka, itu tidak menjadi beban bagi kami”⁷¹

Kemudian menurut kepala sekolah MIN 3 Banda Aceh yang menyatakan:

“Alhamdulillah tidak hambatan yang kami lalui selama pengelolaan Dana BOS. Dan jika adapun suatu kendala, kami dari pengelola Dana BOS langsung mengadakan rapat. Kami sering mengadakan rapat untuk memutuskan segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik itu rapat dengan wali murid maupun dengan pihak guru.”⁷²

Kemudian pernyataan dari Komite sekolah MIN 3 Banda Aceh:

“ jika ditanya tentang hambatan, maka hanya ada hambatan kecil, yaitu biasanya setiap ada kegiatan kami selalu mengadakan rapat dengan wali murid untuk membicarakan kesepakatan dan pengajuan usulan atau pendapat untuk melaksanakan kegiatan. Hanya saja usulan-usulan itu tidak langsung kita jalankan. Kita kembali memilih perencanaan kegiatan sesuai dengan jumlah dana yang masuk dari anggaran Dana BOS. Jika anggaran Dana BOS tidak dapat mendukung usulan kegiatan tersebut dikarenakan kekurangan dana, maka akan diganti dengan perencanaan lainnya yang seimbang dengan anggaran.”⁷³

Adapun dari rekapan wawancara di atas yang mengatakan adanya sedikit hambatan atau kendala dalam mengelola Dana BOS, Akan tetapi adanya kendala

⁷¹Zuraida, Bendahara Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata,18 Juni 2020

⁷²Zuriati, Kepala Sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata,18 Juni 2020

⁷³Mursalin, Komite sekolah MIN 3 Banda Aceh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, wawancara oleh peneliti di Luengbata,23 Juni 2020.

tersebut tidak menghalangi pihak sekolah untuk tetap menjadikan pendidikan madrasah yang bermutu.

Kemudian berdasarkan permasalahan awal yang ditulis oleh peneliti dalam karya ilmiah ini yang didapatkan dari hasil rekapitulasi data EMIS tahun ajaran 2018/2019 mengenai kesulitan pihak sekolah dalam pengadaan buku akan tetapi persediaan perpustakaan MIN 3 Banda Aceh tidak ada. Setelah peneliti melakukan penelitian lanjutan ternyata hasil yang peneliti dapatkan adalah adanya keterlambatan pihak sekolah untuk mengupdate data data jumlah siswa, guru dan sarana prasana madrasah. Hal tersebut juga didukung oleh rekapitulasi data EMIS Kemenag bahwasanya MIN 3 Banda Aceh pada provinsi Aceh kota Banda Aceh berada di urutan ke 15 terlambat melakukan update data yaitu pada tanggal 31 Maret pukul 11:53:18.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Data EMIS

Status	BAP	NSM (NPSN)	Siswa	Guru	Tendik	Kelas	Lab
Negeri	2020-03-31 11:53:18	111111710003	483	29	10	13	0

Sumber : Rekapitulasi Data EMS DASHBOARD Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari bab pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan Dana BOS pada bab sebelumnya dapat disimpulkan pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh tertata dengan baik. Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Efektivitas Pengeloaan Dana BOS

Ketepatan sasaran program yang terbagi kepada 3 sasaran yaitu bagi sekolah, bagi guru dan bagi siswa dapat dikatakan cukup efektif. Karena anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu diberikan bantuan beasiswa dari anggaran Dana BOS dan setiap siswa juga mendapatkan keringanan buku paket madrasah. Jadi, dengan bantuan beasiswa tersebut dapat meringankan beban orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Begitupun dengan guru yang mendapatkan kemudahan untuk melengkapi media belajar pada siswa. Guru tidak kesulitan lagi untuk mengeluarkan anggaran dari uang pribadi. Sedangkan sekolah juga dapat terbantu untuk melunasi pembayaran biaya listrik, air dan sebagainya sesuai dengan komponen pembiayaan yang sudah ada dalam juknis Dana BOS. Sosialisasi program mengenai pengelolaan dana BOS di MIN 3 Banda Aceh melibatkan adanya kesepakatan dari wali-wali murid siswa terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan

melalui anggaran Dana BOS. Akan tetapi sosialisasi program masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti tidak adanya spanduk ataupun lembaran kertas yang tertempel di depan halaman sekolah yang berisi uraian dari penggunaan Dana BOS di madrasah. Begitupun dengan keberhasilan tujuan program yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan anak memang sudah cukup efektif. Hal ini terbukti bahwa prestasi yang didapatkan oleh siswa MIN 3 sudah cukup banyak. Prestasi prestasi tersebut didapatkan juga dari kegiatan eskul madrasah yang dilaksanakan rutin oleh madrasah setiap selesai ujian semester. Sedangkan pemantauan program yaitu terdapat 2 dari sisi internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah yang merupakan pengelola sekolah tertinggi. Kepala sekolah yang akan mengontrol apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak. Jika terdapat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan ada revisi RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) untuk tahun ajaran berikutnya. Pengawasan eksternalnya, ialah pengawasan yang dilakukan dari luar lingkup sekolah. pengontrolan eksternal dilaksanakan oleh tim audit dari Kemenag (Kementrian Agama) kota dan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) untuk melihat kesesuaian program terhadap kebutuhan dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS.

2. Faktor hambatan dalam mengelola Dana BOS

Terdapat hambatan kecil dalam pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh, yaitu terkait dengan penyaluran Dana BOS di madrasah negeri yang diberikan 1 tahap untuk 1 tahun anggaran. Hambatan ini hanya terlihat saat ada siswa baru yang mendaftar di semester 2, karena pada saat itu siswa semakin bertambah dan buku yang tersedia sudah sesuai dengan jumlah siswa yang dilaporkan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan awal yang ditulis oleh peneliti dalam karya ilmiah ini yang didapatkan dari hasil rekapitulasi data EMIS tahun ajaran 2018/2019 mengenai kesulitan pihak sekolah dalam pengadaan buku akan tetapi persediaan perpustakaan MIN 3 Banda Aceh tidak ada. Setelah peneliti melakukan penelitian lanjutan ternyata hasil yang peneliti dapatkan adalah adanya keterlambatan pihak sekolah untuk mengupdate data data jumlah siswa, guru dan sarana prasana madrasah.

5.2 Saran

1. Untuk mengoptimalkan sosialisasi dari pengelolaan dana BOS di MIN 3 Banda Aceh terhadap penggunaan dana BOS sebaiknya tidak hanya dibicarakan saat rapat dengan wali murid, tetapi juga ditempel di dalam depan sekolah. Agar masyarakat lain juga tau, tau jika ada walimurid tidak hadir juga bisa mengetahui penggunaan dana BOS tersebut.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah responden penelitian yaitu pada dinas Kemenag (Kementrian Agama) untuk mengetahui tingkat pertanggungjawaban/akuntabilitas madrasah secara vertikal.

3. Diusahakan tidak ada keterlambatan dalam mengupdate data data terbaru.
Agar dapat memudahkan masyarakat untuk melihat data data terbaru yang ada di MIN 3 Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2012 *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Akasara.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Bohari. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta :PT Bumi Aksara.
- Darmadi. 2018 *Guru Jembatan Revolusi*. Surakarta : Percetakan CV Oase Group.
- Herdiansyah, Heri. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Kompri. 2017 *Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah*. Jakarta :Kencana.
- Mardikonto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta
- Makmur.2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung:Refika Aditama.
- Miles dan Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyasana, Dedi. 2013. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung:PT Remaja Rosda Karya.
- Patilima, Hamid. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta:Alfabeta.
- Pradjasto, Arintono. 2011. *Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Demos
- Sa'ud, Udin Syaefuddin dan Abin Makmun. 2006. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Sore, UddinBdanSobirin. 2017.*KebijakanPublik*. Makassar: CV Sah Media.
- Steers, M.R. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suwendra, Wayan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: NilaCakra.

Winardi. 2011. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.

Jurnal/Skripsi:

Amelia, Rizcah. 2015. Skripsi : *Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Anaka Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Depiani, Depniliza. 2015. *Efektivitas Pemanfaatn Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* .Jurnal Manager Pendidikan. 09(02),13.

Dewi, Ayu Komang Ratna, dkk. 2015. *Efektivitas Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng*. 6(1),9.

Hibrida, Anas Romzy. 2013. Skripsi : *studi efektivitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS)*. Universitas Jember.

Jibril, Ahmad. 2017. Skripsi: *Efektivitas Program Perpuseru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan*. Universitas Airlangga.

Mellani. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pada SMA Aisyah 1 Palembang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Setiawan, wawan dkk. 2019. *Efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser*. 7(1),93-94.

Soamole, Farida. 2017. *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswadi Sd Negeri 11 Abeli Kel.Tobimeitakec. Abeli Kota Kendari*. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. IAIN Kediri.

Sumarni. 2014. *Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Madrasah*. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. 12 (1), 83-84.

Syamsir. 2014. Skripsi: *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Universitas UIN Alauddin Makassar.

Yanuari, Eka. 2017. *Pemikiran pendidikan Ki.Hajar Dewantara dan Relevansinya dengan Kurikulum 13*. Jurnal Stain Kudus. 11 (2), 247.

Yuliana, Kartika Febri. 2017. *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km)*. Skripsi:Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-undangan:

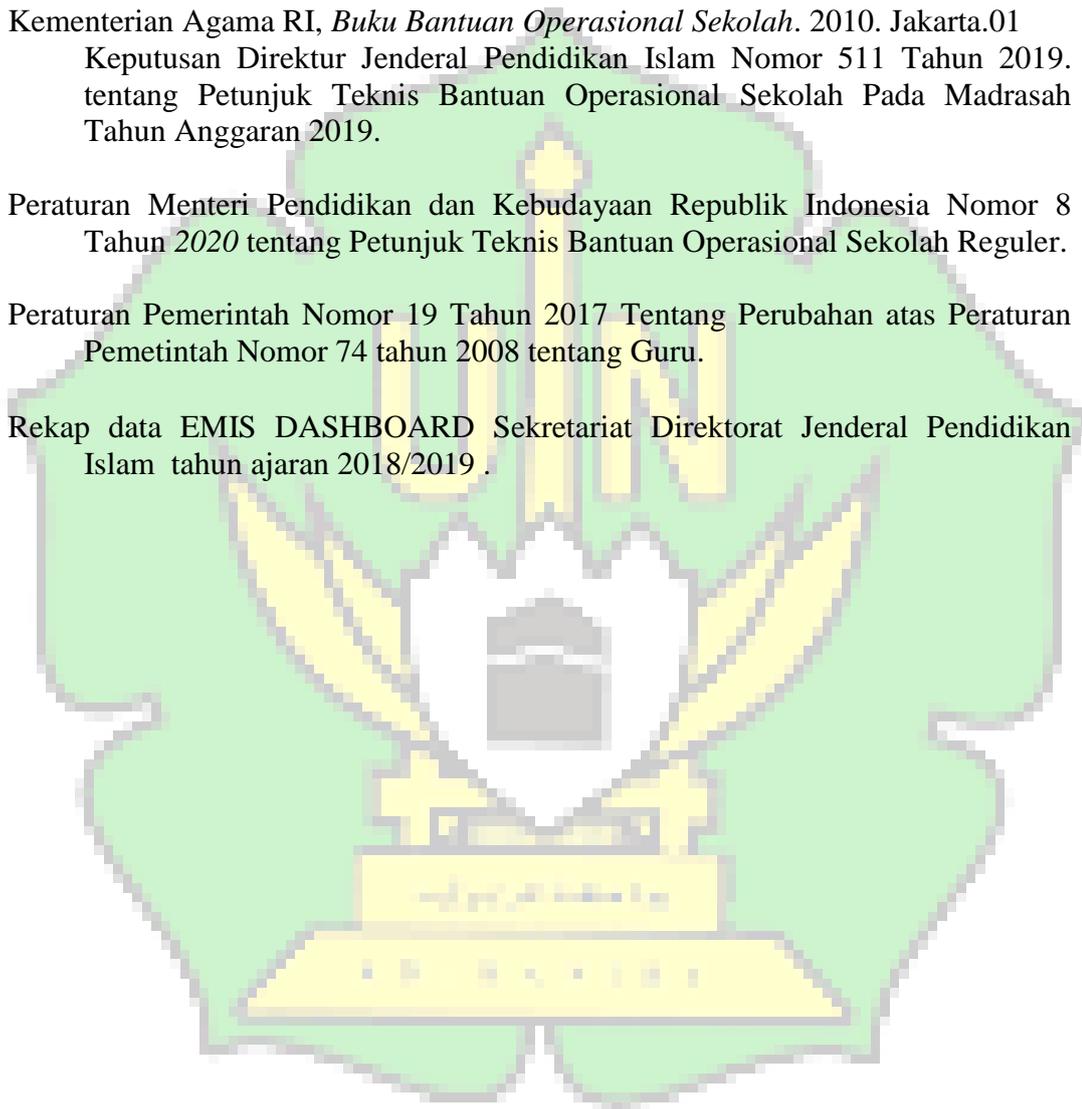
Kemendiknas,Petunjuk Teknis *Penggunaan* Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015.

Kementerian Agama RI, *Buku Bantuan Operasional Sekolah*. 2010. Jakarta.01
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019.
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah
Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemetintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Rekap data EMIS DASHBOARD Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam tahun ajaran 2018/2019 .



DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 391/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Sebagai pembimbing pertama
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Putri Aklima
NIM : 160802029
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An: Rektor
Dekan,



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-715/Un.08/FISIP/PP.00.9/3/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Maret 2020

Kepada Yth,

di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Putri Aklima
NIM : 160802029
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh.
Lokasi Penelitian : MIN 3 Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

[Signature]
Nita Dewi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
Jalan Mohd. Jam No. 29 Telp 6300597 Fax. 22907 Banda Aceh Kode Pos 23242
Website : kemenagbna.web.id

Nomor : B- 0 643 -/Kk.01.07/4/TL.00/06/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : Nihil
Hal : **Rekomendasi Melakukan Penelitian** 17 Juni 2020

Yth, Kepala MIN 3 Banda Aceh

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor : B-715/Un.08/FISIP/PP.00.9/03/2020 tanggal 13 Maret 2020, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan data maupun informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi persyaratan bahan penulisan **Skripsi**, kepada saudara/i :

Nama : **Putri Aklima**
NIM : 160802029
Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Semester :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus berkonsultasi langsung dengan kepala madrasah, Sepanjang Tidak mengganggu proses belajar mengajar
2. Tidak memberatkan madrasah.
3. Tidak menimbulkan keresahan-keresahan lainnya di Madrasah.
4. Foto Copy hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar diserahkan ke Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Demikian rekomendasi ini kami keluarkan, Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah,



Mulizar

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3**

Jalan Kutilang No. 7 Gp. Sukadamai Kota Banda Aceh – 23249, Telp. 0651 - 22789
Website: www.minsukadamai.sch.id
Email: 02504.601021kd@gmail.com

Nomor : B-109/Mi.01.07.03/Kp.004/06/2020 24 Juni 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Keterangan Telah Melakukan
Penelitian**

Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor :B-715/Un.08/FISIP/PP.00.9/03/2020 tanggal 17 Juni 2020 , maka kepala MIN 3 Kota Banda Aceh menyatakan:

Nama : Putri Aklima
Nim : 160802029
Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar – Raniry Banda Aceh

Benar telah melakukan observasi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Banda Aceh Tanggal 23 Juni 2020

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala,

Zuriati S. Ag. M. Pd
NIP 19780125 200501 2 002

DRAFT PERTANYAAN

Kepala Sekolah :

1. Bagaimana penetapan prosedur pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS?
2. Bagaimana pelaksanaan program dana BOS di MIN 3 Banda Aceh?
3. Bagaimana pelaporan pembiayaan program dana BOS di MIN 3 Banda Aceh?
4. Sarana apa saja yang sudah terbantu dengan adanya program dana BOS di MIN 3 Banda Aceh?
5. Apakah dengan adanya program dana BOS dapat membantu meningkatkan prestasi anak?
6. Apakah ada program ekstrakurikuler di MIN 3 Banda Aceh?
7. Program ekstrakurikuler apa yang sangat membantu meningkatkan prestasi anak?

Bendahara :

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan program dana BOS di MIN 3 Banda Aceh?
2. Bagaimana penetapan tujuan atau sasaran yang berhak dicapai dalam perencanaan pembiayaan terhadap salah satu program dana BOS di MIN 3 Banda Aceh?
3. Bagaimana pelaporan pembiayaan terhadap pengelolaan dana BOS ke data EMIS Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun ajaran 2018/2019?
4. Apakah program dana BOS memberikan implikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah?
5. Bagaimana tugas bendahara dalam proses pengelolaan pembiayaan dana BOS di MIN 3 Banda Aceh?
6. Apakah terdapat perencanaan pembiayaan yang khusus yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak?
7. Apakah terdapat kendala terhadap pengelolaan dana BOS?

Komite sekolah:

1. Sepengetahuan bapak/ibu, bagaimana perencanaan pembiayaan program Dana BOS?
2. Bagaimana keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan program Dana BOS?
3. Bagaimana pelaksanaan program dana BOS di MIN 3 Banda Aceh?
4. Apakah pernah kurang Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh?
5. Apakah ada kendala terhadap pengelolaan Dana BOS?

Guru :

1. Apakah pernah diadakan rapat terkait dengan pengadaan buku baru dengan setiap guru sesuai mata pelajarannya?
2. Bagaimana mekanisme rapat guru untuk diskusi penambahan buku?
3. Apakah pernah ada buku yang diajukan tidak direkomendasikan untuk biaya dari anggaran Dana BOS?

Wali Murid

1. Apakah buku yang dibagikan kepada siswa selalu lengkap?
2. Apakah ada biaya tambahan untuk pemeliharaan buku?
3. Pernahkah wali murid diadakan rapat untuk pembicaraan Dana BOS di Madrasah?
4. Apakah anda sebagai orang tua pernah mendapatkan beasiswa dari sekolah anak anda?

FOTO DOKUMENTASI

(Keadaan Perpustakaan MIN 3 Banda Aceh)



(VISI MISI MIN 3 Banda Aceh)



(Struktur Organisasi MIN 3 Banda Aceh)



(Kepala Sekolah MIN 3 Banda Aceh)



(Foto Bersama staff MIN 3 Banda Aceh)



(Foto Bersama 3 Wali Murid MIN 3 Banda Aceh)



